

**LAPORAN AKHIR
RISET PENGEMBANGAN & PENERAPAN (RPP)**



JUDUL PENELITIAN

**MEMPERKUAT LOKALITAS KOTA SEMARANG
DI ERA GLOBALISASI MELALUI DIPLOMASI LOKAL**

Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun

TIM PENELITIAN:

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si | 0022046308 |
| 2. | Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. | 0001078702 |
| 3. | Marten Hanura, S.IP., MPS | 0001038507 |

Dibiayai dengan Sumber Dana
Selain APBN DPA SUKPA LPPM Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2017

Halaman Pengesahan Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP)

1. a. Judul Penelitian : Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi melalui Diplomasi Lokal
- b. Bidang Penelitian : Ilmu Hubungan Internasional
2. Lama Penelitian : 8 bulan
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Gol/Pangkat/NIP : 3c/196304221989032001
 - d. Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/S1-Hubungan Internasional
 - f. Pusat Penelitian : LPPM
4. Alamat Ketua Peneliti
 - a. Alamat kantor/Telp/Fax/Email : Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang
Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01,
 - b. Alamat rumah/Telp/Fax/Email : Bulusan, Tembalang, Kota Semarang.
Telp. 024 76482700
5. Anggota Peneliti : 1. Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. –
: 0001078702
: 2. Marten Hanura, S.IP., MPS - 0001038507
6. Pembiayaan
 - a. Tahun pertama : Rp. 40.000.000
 - b. Tahun kedua : Rp. 40.000.000
 - c. Tahun ketiga : Rp. 60.000.000

Semarang, 27 Nopember 2017

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Dr. Sunarto, M.Si
NIP. 19660727 199203 1 001

Dra. Rr. Hermini Susiatingsih, M.Si
NIP. 19630422 198903 2 001

Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Rer. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GRAFIK, TABEL, DAN GAMBAR.....	4
ABSTRAK.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian	8
1.3 Urgensi Penelitian	8
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Prosedur Penelitian.....	17
3.2 Subyek Penelitian.....	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.4 Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN	26
Lampiran 1 Susunan Organisasi	
Lampiran 2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian	
Lampiran 3 Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti	
Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Peneliti	

DAFTAR GRAFIK, TABEL DAN GAMBAR

Bagan 1.1 Alur Penelitian	17
Tabel 1.2 Kegiatan Penelitian	18

ABSTRAK

Globalisasi sebagai dimensi terbuka memberikan jalan bagi interaksi tak terbatas antar area yang berujung pada interaksi lokalitas. Lokalitas sendiri pada dasarnya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai identitas yang unik. Untuk menjembatani interaksi lokalitas tersebut, dibentuklah model paradiplomasi berupa *sister city*. *Sister city* adalah hubungan kerjasama yang dirintis berdasarkan kesamaan antara dua kota. Kerjasama *sister city* menjadi peluang serta ancaman bagi lokalitas suatu kota di mana kedua kota akan menunjukkan bagaimana lokalitas masing-masing mendefinisikan hubungan kerjasama di antara keduanya.

Sebagai akademisi Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro, universitas negeri terbesar di Jawa Tengah, peneliti mengamati belum ada kerangka kerja sama Pemerintah Kota Semarang yang dirancang khusus berdasarkan hasil riset studi Hubungan Internasional yang juga mengkaitkan dengan studi bidang pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah (otonomi dan desentralisasi). Sementara, diplomasi merupakan *core* hubungan internasional dan lokalitas merupakan kajian bidang otonomi daerah dan desentralisasi. Berangkat dari keadaan tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Kerja sama seperti apa yang perlu diinisiasi oleh Kota Semarang?; (2) Bagaimana memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi?; serta (3) Seberapa jauh model *sister city* mampu memperkuat lokalitas Kota Semarang?

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan, atau R & D, yang terdiri atas 3 (tiga) tahap: Tahap pertama adalah tahap analisis kebutuhan. Tahap ke-dua adalah usulan pengembangan model diplomasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tahap tiga adalah uji efektivitas model yang dikembangkan. Penelitian ini telah memasuki tahap kedua yaitu pemetaan dan analisa efektifitas kerja sama *sister city* sebagai model diplomasi.

Penelitian tahap kedua ini diharapkan menghasilkan: (1) Gambaran tentang model diplomasi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang; (2) Gambaran identifikasi model diplomasi yang efektif dan efisien dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi; dan (3) analisis model *sister city* yang ideal bagi Kota Semarang serta (4) Artikel hasil penelitian untuk publikasi nasional dan/atau internasional.

Kata kunci: lokalitas, paradiplomasi, *sister city*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin maju mengakibatkan runtuhnya batas-batas negara yang selama ini ada. Globalisasi pula yang membuka jalan pada interaksi antar negara dan antar manusia yang lebih intens. Ketika batas-batas melebur, manusia dan negara dituntut untuk mampu berinteraksi tanpa melupakan identitas diri. Globalisasi memberikan peluang sekaligus ancaman bagi berkembangnya lokalitas sebagai identitas.

Lokalitas sendiri pada dasarnya merupakan ciri khas yang mendefinisikan apa dan bagaimana manusia mempersepsikan tempat tinggalnya. Sering kali kita temukan sekelompok masyarakat yang memproklamirkan kebanggaan atas tempat ia berasal, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada tentunya. Kebanggaan pada tempat asal merupakan alasan utama mengapa lokalitas menjadi penting karena ia memberikan identitas dan afiliasi yang mengidentifikasi ciri dari kelompok masyarakat.

Kembali pada konteks globalisasi, area yang dibuka lebar-lebar oleh globalisasi menjadi arena persaingan antar lokalitas yang dimiliki oleh area tertentu beserta masyarakat yang berdiam di sana. Globalisasi kemudian menjadi ajang rivalitas dan penentuan dominasi antar lokalitas yang ada. Untuk menjelaskan persaingan lokalitas tersebut, diperlukan suatu konsep yang mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana lokalitas bekerja serta kaitannya dengan kemampuan lokalitas bersinergi atau bahkan melenyapkan lokalitas lain. Konsep tersebut adalah paradiplomasi.

Paradiplomasi memberikan perhatian khusus di mana lokalitas tertentu mampu tampil menjadi dominan dalam persaingan yang terjadi dalam dimensi globalisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap lokalitas memiliki ciri unik masing-masing. Dengan menggunakan paradiplomasi sebagai sarana utama, suatu lokalitas dapat menjadi dominan dan menjadi agen globalisasi di mana area lain akan terpengaruh dan beradaptasi pada kekhasan dari lokalitas tersebut.

Implementasi dari paradiplomasi adalah penerapan kerja sama antar kawasan berupa *sister city*. *Sister city* adalah bentuk kerja sama intens yang dirintis oleh dua kota yang memiliki ciri khas kesamaan tertentu, biasanya berupa kesamaan

demografi penduduk, latar belakang budaya, pengembangan potensi ekonomi dan lain-lain. *Sister city* menjadi media aplikasi paling ideal dari paradiplomasi karena memberikan ruang bagi kedua pihak untuk bekerjasama dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah persamaan lokalitas yang membuat kedua kota bertemu. Dimensi kedua adalah persaingan lokalitas yang memfasilitasi kedua kota untuk bersaing menunjukkan lokalitas siapa yang lebih dominan dalam mempengaruhi yang lain.

Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi tersebut, dapat kita sepakati bahwa pelaksanaan *sister city* membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota. Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang dimiliki oleh kota yang menjadi *partner*. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota yang menjalin kerja sama *sister city* untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi lokalitas masing-masing serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun dalam bingkai kerja sama *sister city*. Lebih jauh, kota juga perlu menengok pada lokalitas yang dimiliki oleh partnernya untuk kemudian dianalisis dan dipertimbangkan sejauh mana kemungkinan lokalitas kota partner mampu mempengaruhi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha sadar dan berbasis riset untuk menganalisis bagaimana lokalitas, paradiplomasi dan *sister city* bekerja. Departemen Hubungan Internasional memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model diplomasi yang mampu menjaga lokalitas Semarang, serta menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kota Semarang.

1.2 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian tahap ke-dua ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana lokalitas diakomodir dan diperkuat lewat paradiplomasi. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang lokalitas Kota Semarang;
- b. Untuk mengidentifikasi paradiplomasi yang telah dijalankan Pemerintah Kota Semarang;

- c. Untuk menganalisis kerja sama *sister city* yang efektif dan fisibel dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi, serta model *sister city* yang ideal bagi Kota Semarang.

1.3 Urgensi Penelitian

Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadikan penelitian ini urgen untuk segera dilakukan. Pertama, batas yang makin kabur karena globalisasi mendesak setiap area berupa negara atau kota untuk segera mendefinisikan lokalitas masing-masing. Kedua, lokalitas yang sudah teridentifikasi harus segera diperkuat melalui serangkaian proses diplomasi, salah satunya lewat proses paradiplomacy. Terakhir, *sister city* sebagai pengejawantahan praktek paradiplomacy perlu mendapat perlakuan khusus jika dipraktikkan terutama di Kota Semarang agar lokalitas yang ada dapat diperkuat dan menjadi dominan dalam proses kerjasama itu sendiri.

Keunikan penelitian ini terletak pada lokalitas dapat bersaing dan diperkuat lewat praktik paradiplomasi yang diimplementasikan dalam model *sister city*. Sebagai salah satu departemen di universitas negeri paling besar di Jawa Tengah, peran Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam membantu menyelesaikan permasalahan di akar rumput dengan berbasis riset sangat dibutuhkan.

Dengan adanya penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berperan dalam mewujudkan Agenda Riset FISIP UNDIP, yakni “Pembangunan dan Pemerataan Sumber Daya dan Teknologi Indonesia secara Berkelanjutan melalui Globalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal demi Tercapainya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

- a. Pengembangan Akademis

Belum banyak penelitian yang menghubungkan antara teori-teori yang mengkaji tentang daerah (internal/domestik) dengan teori-teori hubungan internasional (eksternal), karena secara konvensional, kedua obyek teori tersebut berbeda. Namun, sesuai perkembangan, teori-teori tersebut ternyata dapat digunakan secara komplementer. Dengan menggunakan kedua ranah teori tersebut dalam penelitian tentang lokalitas dengan hubungan internasional ini, maka dapat membuka wacana akademik

bahwa perkawinan antar teori yang berbeda menjadi alat untuk menjawab permasalahan dan perkembangan dinamika kehidupan.

b. Kepentingan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan, baik pemerintah Pusat, Daerah, organisasi bisnis maupun masyarakat bahwa mereka secara institusi maupun perseorangan dapat bertindak sebagai alat diplomasi dalam hubungan internasional.

c. Kepentingan Pembangunan (Daerah)

Penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi Daerah dalam melakukan program-program pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusianya. Sebab, dengan menempatkan rakyat dan Daerah sebagai alat diplomasi dalam kancah pergaulan internasional, maka dalam bersikap, bertindak dan berpikir harus mengingat dan mendasarkan diri pada kepentingan nasional Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Konsep lokalitas (*locality*) pada dasarnya umum digunakan dalam dunia arsitektur. Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses* mendefinisikan lokalitas sebagai “... a distinct population cluster (also designated as inhabited place, populated centre, settlement and so forth) in which the inhabitants live in neighbouring sets of living quarters and that has name or a locally recognized status” (unstats.un.org, 2008). Lokalitas berkaitan erat dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri, yang kemudian dapat melekat menjadi sebuah status, seperti desa nelayan, kamp pertambangan, peternakan (*ranch*), kota pasar (*market town*), desa, kota, dan lain sebagainya. Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu wilayah dapat memiliki dua atau lebih lokalitas, yang kemudian membedakannya dari wilayah lainnya. Lokalitas memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya, seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Ditinjau dari segi geografis, Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Semarang sebagai pintu perdagangan. Secara historis, pembangunan Kota Semarang lebih banyak difokuskan pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri. Sebagai salah satu kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan sejak era kerajaan Hindu-Buddha dan semakin ditegaskan fungsinya di era pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Semarang lebih banyak mengembangkan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi berbasis jasa, dengan rancangan tata ruang kota yang juga dibuat berdasarkan tujuan tersebut (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dengan menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan bagi wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jumlah lahan yang terbatas di daerah rural untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian.

Wilayah Kota Semarang lebih banyak difungsikan sebagai pusat administrasi dan bisnis, sementara wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Kedungsepur) adalah *hinterland* Kota Semarang, yang berguna untuk menunjang kehidupan wilayah kota (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri, seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru.

Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014). Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modal tersendiri bagi Kota Semarang, karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, yang antara lain meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir ini kemudian menjadi modal Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya.

Jika dilihat dari sejarahnya, diplomasi seringkali dikaitkan dengan diplomat, di mana fungsi diplomat dianggap sebagai penentu baik-buruknya hubungan antar negara. Namun, fungsi dan peran tersebut kemudian mengalami pergeseran, karena pada kenyataannya setiap orang dapat berdiplomasi dan membahas berbagai permasalahan internasional, tanpa harus terlebih dahulu menjadi diplomat. R.P. Barston (2006) menjelaskan bahwa sistem internasional mempengaruhi perkembangan diplomasi tersebut. Perang Dingin banyak membawa perubahan di dunia, seperti terbentuknya negara-negara baru, pergeseran aktor dalam sistem hubungan internasional, serta munculnya isu-isu baru yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, karena masyarakat terlalu sibuk mengurus perang. Perubahan-perubahan tersebut ikut mendorong terjadinya evolusi diplomasi, yang antara lain dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kunjungan perwakilan negara, pengambilan keputusan dalam institusi internasional, pembahasan isu-isu baru seperti yang bertemakan humanitarisme, serta munculnya berbagai forum berskala internasional lainnya.

Paradiplomasi pertama kali muncul pada tahun 1980-an dalam tulisan Ivo Duchaeck dan Panayotis Soldatos, yang menggabungkan kata "*parallel*" dan "*diplomacy*" (Tavares, 2016), dan mengacu pada makna "... *the foreign policy of non-central government*". Secara singkat, konsep paradiplomasi muncul sebagai upaya konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan. Paradiplomasi seringkali digunakan secara bergantian dengan diplomasi lokal. Jika diplomasi lokal lebih menekankan pada aktor yang melakukan diplomasi, paradiplomasi lebih menitikberatkan fokus pada relasi paralelnya dengan diplomasi konvensional.

A. Kuznetsov (2015) mendefinisikan paradiplomasi sebagai “... *a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors*”. Seperti halnya diplomasi pada umumnya, paradiplomasi merupakan salah satu cara Negara, melalui Daerah, mencapai politik luar negeri, sehingga kepentingan nasional dapat terpenuhi. Hingga awal abad ke-21, berbagai urusan luar negeri masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kementerian luar negerinya. Namun, Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor diplomasi. Peran aktor diplomasi lain, seperti kota, juga diperhitungkan di era globalisasi ini. Oleh sebab itu, segala hubungan luar negeri yang dijalankan oleh Daerah, atau secara khusus dalam hal ini Kota, harus tetap mengacu pada politik luar negeri.

Tujuan paradiplomasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi, politik, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Berkaitan dengan hal ini, André Lecours (2008) menegaskan bahwa ada sedikitnya tiga lapisan paradiplomasi (*layers of paradiplomacy*). Lecours dalam *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World* (2008) menjelaskan bahwa lapisan pertama berkaitan dengan isu ekonomi, dimana pemerintah sub-negara bertujuan membangun eksistensi internasional dalam rangka menarik investasi dan perusahaan asing, serta membuka pasar ekspor yang baru. Dengan demikian, tidak ada tujuan lain dari paradiplomasi lapis pertama ini selain fungsi kompetisi ekonomi global. Lapisan ke-dua dari paradiplomasi memiliki aktivitas komunikasi yang lebih intens dari lapisan pertama, dimana interaksi yang terjalin tidak lagi hanya sebatas fungsi ekonomi saja, tetapi juga merambah ke kerja sama untuk peningkatan hubungan *people to people* di level akar rumput dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Terakhir, yakni lapisan ke-tiga paradiplomasi, memiliki tujuan politik, dengan mengadvokasi identitas lokal di level internasional, yang mungkin berbeda dengan persepsi hasil konstruksi pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah sub-negara mencoba membangun hubungan internasional yang dapat mendukung perbedaan budaya, otonomi politik, serta karakter dari komunitas yang diwakilinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun yang menjadi dasar dan bagaimanapun pola diplomasi, tujuan utamanya adalah menarik perhatian masyarakat global terhadap keunikan region, sehingga layak untuk dimasukkan dalam peta global. Dalam hal ini, paradiplomasi berupaya mengubah

terra incognita menjadi tempat yang menarik dengan potensi maupun permasalahan yang dimilikinya (Sergunin & Joenniemi, 2014). Sejalan dengan konteks ini, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang pada Daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Hal ini kemudian dapat menciptakan suasana kompetisi antar Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah sudah sering dibahas, mengingat tidak sedikit negara yang menganut desentralisasi dan otonomi daerah sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui UNDP (United Nations Development Programs) mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut:

“... the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional, and local levels, according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels. ... Decentralization could also be expected to contribute to key elements of good governance, such as increasing people’s opportunities for participation in economic, social, and political decisions; assisting in developing people’s capacities; and enhancing government responsiveness, transparency, and accountability.” (UNDP, 1999)

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional mendorong desentralisasi dan otonomi daerah dalam praktik diplomasi. Dalam perkembangannya, tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi, sebagai unit pemerintahan di bawah Negara. Daerah mendapatkan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pada dasarnya telah memberikan keleluasaan pada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18, disebutkan bahwa pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Lebih lanjut, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu guna menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (dpr.go.id, 2017). Dalam perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, otonomi daerah semakin dipandang perlu. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1997 mengakhiri tata pemerintahan sentralistik dan menjadi titik awal diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengembangkan daerah agar lebih maju, maka Pemerintah Indonesia antara lain mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Menyadari pentingnya paradiplomasi bagi kemajuan daerah di era globalisasi, Pemerintah Kota Semarang tidak dapat memungkiri pentingnya memperkuat modalitas-modalitas lokal sebagai modal utama dalam mempromosikan wilayahnya di arena global. Kesadaran akan peluang akses komunikasi yang dibuka melalui arus globalisasi dan pemahaman akan potensi lokal Kota Semarang yang berdiri dan berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan, mendorong munculnya skema kebijakan publik berbasis MICE (*meetings, incentives, conferences, and events*), dengan Sem'Biz (Semarang Business Forum) sebagai salah satu program pendukungnya. Sem'Biz mempertemukan *stakeholders* bisnis dan investasi, mulai dari unsur pemerintah kota atau kabupaten; instansi penanaman modal kota atau kabupaten; pelaku usaha (investor); asosiasi pengusaha atau profesi; lembaga

keuangan; serta BUMN dan BUMD, yang kemudian menghasilkan LoI (*Letter of Intent*) sebagai bukti komitmen para aktor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang dan sekitarnya (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Melalui Sem'Biz, Kota Semarang secara aktif mempromosikan potensi investasi properti.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta semakin meningkatnya ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya mendorong Daerah untuk memperkuat paradiplomasi melalui kemitraan internasional, sehingga berkembang kerja sama *sister city*. *Sister city*, *twin city*, atau kota kembar adalah "... a broad-based, long-term partnership between two communities in two countries. ... officially recognized after the highest elected or appointed official from both communities sign off on an agreement" (sister-cities.org, 2017). Secara sederhana, kerja sama *sister city* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti kota atau provinsi. Ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) seringkali dijadikan tanda bahwa kerja sama antar kota telah disahkan. Mengingat MoU kerja sama *sister city* tergolong sebagai dokumen perjanjian internasional, maka penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional (bdg.ksln.co.id, 2017). Penyusunan MoU kerja sama *sister city* dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani LoI, dan memiliki rencana kerja sama yang disetujui Pusat.

LoI bertujuan untuk meningkatkan itikad baik dan persahabatan, serta rasa pengertian dan kerja sama saling menguntungkan di antara masyarakat kedua kota kemlu.go.id, 2017). Lebih lanjut, LoI juga merupakan bentuk keinginan kedua Walikota untuk meningkatkan kerja sama di bidang-bidang seperti ekonomi, industri dan perdagangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, kesehatan dan rumah sakit, kebudayaan, kesenian, serta pariwisata.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 mengakui Daerah sebagai salah satu aktor dalam hubungan luar negeri. Kerja sama *sister city* pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia; tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing (Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia, 2012). Kota Semarang telah melakukan beberapa kerja sama *sister city*, antara lain dengan Brisbane, Australia; Beihai, Republik Rakyat Tiongkok; Fuzhou, Republik Rakyat Tiongkok; Jung-gu, Korea Selatan; dan Hanoi, Republik Sosialis Vietnam.

Adanya kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Semarang dengan kota-kota lain di luar negeri menjadi sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan. Menurut Sister Cities International, “... *sister city relationships offer the flexibility to form connections between communities that are mutually beneficial and which address issues that are most relevant for partners*” (sister-cities.org, 2017). Sebagai bagian dari paradiplomasi, kerja sama *sister city* juga diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerja sama yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Konsep *sister city* bukanlah konsep baru, dan sudah berkembang setelah Perang Dunia II berakhir. Kerja sama *sister city* pada waktu itu bertujuan untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan mendamaikan masyarakat melalui aktivitas pertukaran budaya dan pendidikan (cities-today.com, 2014). Namun, di era modern, Jonathan Ballantine mengungkapkan bahwa kemitraan *sister city* semakin banyak digunakan untuk mempererat aktivitas ekonomi dan perdagangan (cities-today.com, 2014). Melalui kemitraan *sister city*, pemerintah daerah dapat menemukan peluang baru untuk pembangunan daerahnya, dengan mengoptimalkan lokalitas.

Di era globalisasi seperti saat ini, kota-kota besar seperti Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan lokalitas, seiring dengan berubahnya zaman. Guna meningkatkan kapasitasnya dan juga dengan pertimbangan aspek efisiensi, Kota memang perlu mencari mitra luar negeri yang dapat diajak kerja sama. Tetapi, kerja sama tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan rakyat Daerah saja, tetapi juga semakin memperkuat lokalitas Kota Semarang.

1.6 Metodologi Penelitian

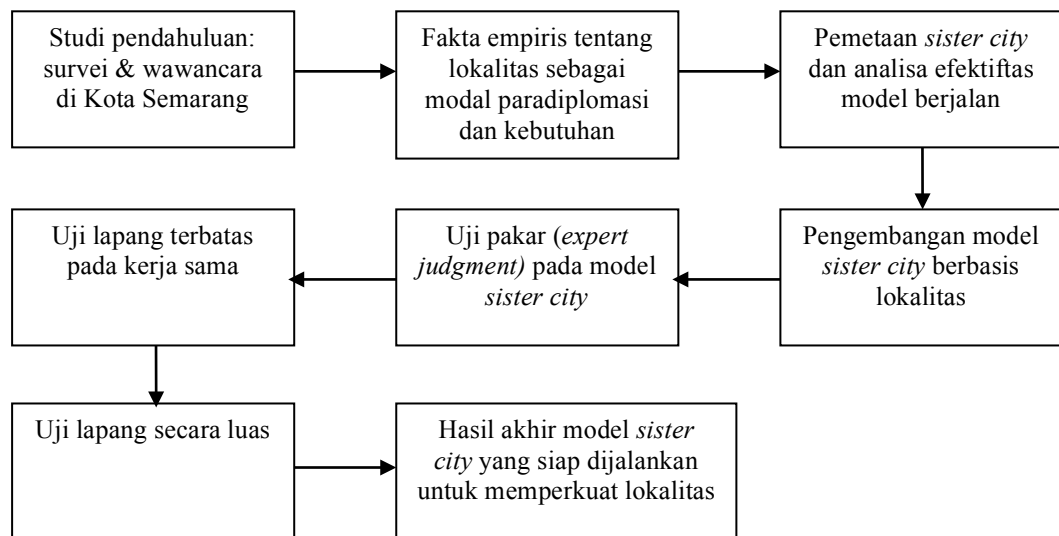
1.6.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah bagian penelitian *multiyears*, yang rencananya akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Penelitian pada tahun pertama telah dilakukan dan berhasil melakukan pemetaan awal lokalitas Kota Semarang serta paradiplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menggandeng

partner internasional maupun nasional. Hasil pemetaan ini berfungsi sebagai landasan penelitian tahun kedua yang diajukan pada tahun ini, yang bertujuan untuk memetakan tahap paradiplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk *sister city*, yang mana ingin diketahui efektifitasnya dalam memperkuat dan mempromosikan lokalitas. Hal ini menjadi landasan dalam mengembangkan model *sister city* yang efektif dan fisibel bagi Kota Semarang. Selanjutnya, pada tahun ke-tiga, dengan menggunakan metode penelitian *forecasting*, akan dianalisis *sister city* yang telah dikembangkan melalui penelitian tahap dua tersebut.

Dengan penelitian yang bertahap, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis melalui pengembangan konsep paradiplomasi melalui model *sister city* yang secara khusus dibangun untuk memperkuat lokalitas di tengah gerusan arus utama globalisasi. Secara sederhana, gambaran prosedur pelaksanaan ketiga penelitian dapat dilihat pada Bagan 1.1 dan Tabel 1.2 berikut:

Bagan 1.1 Alur Penelitian



Tabel 1.2 Kegiatan Penelitian

No.	Tahap	Kegiatan	Luaran Kegiatan (Indikator)
1.	Analisis kebutuhan	Survei tentang pengaruh globalisasi terhadap lokalitas Kota Semarang dan identifikasi lokalitas melalui wawancara dan observasi lapangan	- Gambaran tentang lokalitas Kota Semarang - Gambaran kebutuhan Kota Semarang - Publikasi
2.	Usulan	Pengembangan <i>sister city</i>	- Draf pengembangan

	pengembangan model	berdasarkan hasil analisis kebutuhan.	skenario <i>sister city</i> - Publikasi
3.	Uji efektivitas model yang dikembangkan	1. Uji pakar 2. Uji lapang terbatas 3. Uji lapang secara luas	- Draf <i>sister city</i> yang sudah direvisi berdasar uji pakar, uji lapang terbatas, dan uji lapang secara luas - Draf akhir - Publikasi

Berdasarkan bagan dan tabel di atas, masalah penelitian yang telah dipecahkan pada **Tahap I** adalah bagaimana lokalitas Kota Semarang di era globalisasi saat ini, dan bagaimana kerja sama di tingkat daerah selama ini dilakukan. Kedua poin tersebut digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan paradiplomasi dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Semarang. Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian Tahap II.

Pada penelitian **Tahap II**, permasalahan yang akan ditangani adalah pemetaan dan evaluasi efektifitas kerja sama *sister city* di Kota Semarang, berdasarkan analisis kebutuhan yang telah diperoleh dari penelitian Tahap I. Sehingga, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak hanya dapat membantu memperkuat lokalitas, tetapi juga mempromosikan lokalitas di tengah era globalisasi.

Terakhir, pada penelitian **Tahap III**, akan dilakukan uji efektivitas terhadap model yang dikembangkan. Rancangan penelitian yang digunakan pada tahap ini adalah rancangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), yang di dalamnya terdapat uji pakar dan uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Terhadap kerangka kerja sama yang sudah direvisi berdasar penilaian penguji atau para ahli, akan dilakukan uji lapang. Uji lapang ini terdiri atas uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Subyek pengguna terbatas adalah Pemerintah Kota Semarang itu sendiri, selaku pemangku kebijakan. Sedangkan untuk uji lapang secara luas akan dipilih tiga kelompok masyarakat yang berada di bawah kerangka kerja sama. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya kerangka kerja sama *sister city* sebagai upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tim peneliti merupakan subyek kunci dalam penelitian ini, yang bertugas mencari data terkait kerja sama *sister city* sebagai bagian dari paradiplomasi. Kedua, Kota Semarang, merupakan subyek untuk pengembangan paradiplomasi melalui *sister city*. Ketiga, pakar dalam bidang demokrasi-desentralistik dan paradiplomasi merupakan subyek yang dilibatkan dalam proses validasi kerja sama yang dihasilkan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang, utamanya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerja sama *sister city*. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai, b) mempersiapkan wawancara, c) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

BAB II

LOKALITAS KOTA SEMARANG SEBAGAI MODALITAS KERJASAMA INTERNASIONAL

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Secara umum, bab ini akan menggambarkan lokalitas Kota Semarang.

2.1 Lokalitas Kota Semarang

Kota Semarang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa merupakan pintu perdagangan sehingga secara historis memiliki posisi penting dalam perkembangan budaya lokal. Interaksi antara kelompok pendatang dan penduduk asli menjadikan Kota Semarang sebagai *melting pot* budaya Jawa, Arab, Cina, dan Belanda. Jejak akulturasi dan asimilasi budaya tersebut masih dapat ditemukan di Kota Semarang, misalnya dalam bentuk arsitektur, seni batik, hingga kuliner.

Eksistensi kelompok diaspora yang berbaur dengan penduduk asli juga menjadi bukti posisi Kota Semarang sebagai *melting pot* dari berbagai budaya semenjak berdiri 500 tahun yang lalu hingga di era globalisasi masa kini. Komunitas diaspora di wilayah Kota Semarang didominasi oleh mereka yang disebut sebagai “peranakan” (keturunan etnis Cina) menjadi refleksi nyata dari interaksi multi etnis yang telah berjalan sepanjang sejarah perkembangan kota.

Akulturasi antara budaya Cina dan Jawa menjadi pengaruh dominan dalam pembentukan karakter budaya Semarang, yang terefleksikan dalam budaya kuliner seperti loempia (lumpia), kue moci, wingko babad, hingga lontong cap go meh. Dalam kesenian daerah, akulturasi antara budaya Jawa dan Cina (juga budaya Arab)

juga dapat dilihat dari pertunjukan seni “Warak Ngendhog” yang merupakan makhluk fiktif berupa binatang berkepala singa (sebagai representasi etnis Cina), berleher panjang (Arab), serta bertubuh kambing (Jawa) yang diarak mengelilingi kota menjelang bulan Ramadhan. Dalam bidang arsitektur, komunitas peranakan yang mulanya bermukim di daerah Simongan, pada tahun 1741 direlokasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Gang Baru yang sekarang berada di kawasan Kota Lama (Pikiran Rakyat, 2016). Dari perpindahan permukiman tersebut, terdapat peninggalan arsitektur berupa Kuil Sam Poo Kong serta arsitektur bangunan bergaya Oriental di kawasan Gang Baru yang kini juga dikenal dengan nama Kampung Pecinan. Aktifitas di kawasan Pecinan ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya Peranakan, sehingga menjadi atraksi wisata tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman belanja dan kuliner tradisional Cina.

Selain Etnis Cina, Kota Semarang sebagai *melting pot* juga mempertemukan budaya Barat yang dibawa oleh pendudukan kolonial Belanda dengan budaya lokal. Meskipun demikian, jejak interaksi antar kedua budaya tersebut lebih bersifat asimilasi dibandingkan akulturasi. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dari segregasi antar ras yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial antara bangsa kulit putih, pribumi, dan bangsa lainnya (termasuk di dalamnya Etnis Cina dan Arab), yang diciptakan dalam stratifikasi sosial masyarakat untuk membatasi interaksi antar kelompok. Pembatasan itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya kolonial yang pada masa itu berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Fungsi yang demikian dapat dilihat dari digunakannya gaya-gaya arsitektur Belanda dalam bangunan-bangunan simbol kekuasaan mulai dari rumah pejabat kolonial, gedung pemerintahan hingga gereja. Tidak adanya pembauran budaya di level akar rumput menjadikan kedua budaya tidak mengalami akulturasi, sehingga ketika pendudukan kolonial berakhir, tidak ada nilai-nilai budaya Barat yang tertinggal dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asimilasi dan akulturasi yang hanya mungkin terjadi karena faktor geografis tersebut telah membentuk ciri budaya lokal yang membedakannya, termasuk dengan wilayah sekitar yang nantinya dikenal sebagai *hinterland* Kota Semarang. Proses budaya yang terjadi telah mempengaruhi *tangible* maupun *intangible culture* yang berkembang, yang nantinya mampu menjadi salah satu modalitas sosial-budaya dalam paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam konteks mempromosikan Kota Semarang

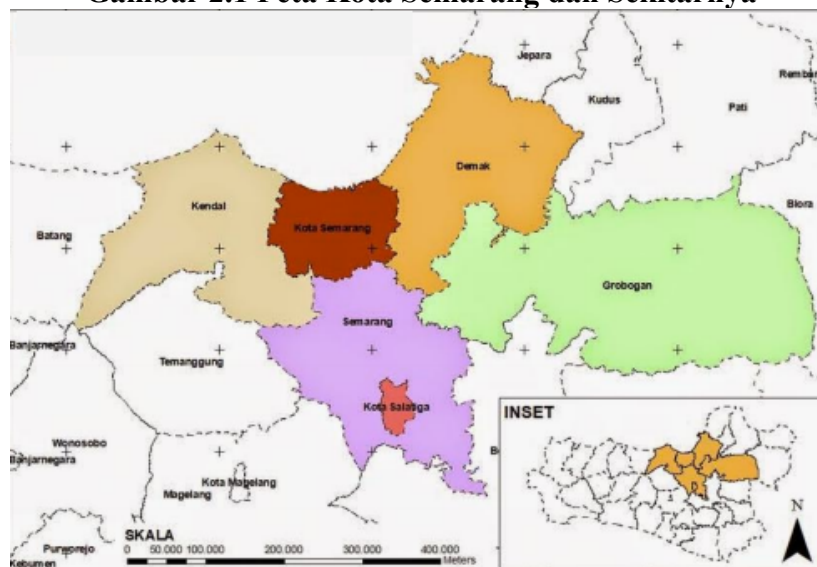
di level global. Modalitas sosial-budaya yang merupakan nilai-nilai budaya ini nantinya mampu menjadi kemas romantisme atas modalitas ekonomi, yang merefleksikan nilai-nilai komersial.

Seperti unsur sosial-budaya yang dipengaruhi perkembangannya oleh kondisi geografis, modalitas ekonomi lokal Kota Semarang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, tidak hanya terkait tipologi yang mempengaruhi tipe aktifitas ekonomi yang dapat dijalankan, tetapi juga persebaran demografi yang nantinya mendorong perubahan strategi pengembangan kota dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah sekitarnya yang termasuk dalam *hinterland* Kota Semarang.

2.2 Peta Potensi Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,67 km² secara administratif terbagi menjadi sedikitnya 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak; sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang; dan sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa. Secara astronomis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara 6°50' - 7°10' LS dan garis 109°35' -110°50' BT. Berikut ini adalah gambaran peta Kota Semarang:

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang dan Sekitarnya



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2015

Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Semarang di sebelah selatan; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur; dan

Kabupaten Kendal di sebelah barat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016, Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki posisi geostrategis, karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang sedikitnya terdiri dari empat simpul gerbang, yaitu koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis, seperti Magelang, Surakarta, yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak atau Grobogan; dan koridor Barat menuju Kabupaten Kendal.

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk hampir mencapai 1,6 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Jawa, Chinese dan Arab, dengan luas wilayah sebesar 373,80 km², yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dalam hal perkembangan terkait kependudukan ini, dapat dikatakan relatif stabil dalam periode waktu selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015. Detail gambaran Kota Semarang menurut data kependudukan dapat terbaca dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Deskripsi Kota Semarang Menurut Data Kependudukan
Periode 2013 - 2015**

Indikator Perkembangan Penduduk Kota Semarang				
Uraian	Satuan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	1.572.105	1.584.906	1.595.187
2. Pertumbuhan Per Tahun	Persen	0,83	0,97	0,59
3. Kepadatan	Per Km2	4.207	4.241	4.269
4. Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	442.089	443.541	471.327
5. Rata-rata Anggota Rumah Tangga	Jiwa	3,56	3,57	3,38
6. Rasio Jenis Kelamin	Per 100 Pddk	99	99	99
7. Tingkat Kelahiran Kasar	Per 1000 Pddk	15,18	15,63	14,22
8. Tingkat Kematian Kasar	Per 1000 Pddk	6,55	6,80	6,77
9. Tingkat Migrasi Masuk	Per 1000 Pddk	19,40	21,03	20,50
10. Tingkat Migrasi Keluar	Per 1000 Pddk	19,47	20,36	21,59
11. TPAK Laki-laki	Persen	80,15	81,97	78,54
12. TPAK Perempuan	Persen	56,11	55,72	56,09

Sumber : BPS Kota Semarang

Keterangan: *) Tahun 2009 TPAK 15 th keatas

Pada Tabel 2.1 dapat disebutkan bahwa dalam hal kependudukan pada periode 2013 – 2015 tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena berada pada suatu kondisi dan trend perkembangan dan atau penurunan yang tidak tergolong ekstrem, kecuali pada indikator jumlah rumah tangga. Kondisi ini dapat dinilai bahwa dalam hal mengelola

perkembangan kependudukan, Kota Semarang dikategorikan berhasil. Keberhasilan pengelolaan kependudukan sangat vital karena akan berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan lainnya, khususnya bidang ekonomi, kesehatan, dan pengangguran.

Kota Semarang ini semakin menjadi penting dan layak untuk diperhitungkan mengingat keberadaannya secara topografi yang sangat menguntungkan sehingga dapat mendorong Kota Semarang menjadi kota pariwisata yang diperhitungkan oleh tidak hanya wisatawan domestik saja tetapi juga internasional. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan pendapatan (asli) daerah sebagai penopang pembangunan dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi dengan otonomi yang berprinsip “seluas-luasnya dan bertanggung jawab” yang ditekankan pada Era Reformasi ini. Kota yang berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, secara topografi wilayahnya terdiri atas wilayah pegunungan/perbukitan (dengan ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut) dan pantai (dengan ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut). Kota ini juga disebut memiliki wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian wilayah yang dikenal sebagai Kota Atas dan bagian wilayah lain yang disebut sebagai Kota Bawah. Lebih dari itu, karena keberagaman dan keunikan yang dimilikinya, maka berbagai sebutan nama untuk Kota Semarang juga menjadi beragam.

Selain memiliki berbagai komoditas yang bernilai ekspor dan jumlah angkatan kerja yang relatif tinggi, Kota Semarang juga memiliki berbagai bangunan yang bernilai historis. Bangunan-bangunan bernilai historis tersebut memiliki beragam latar budaya dan religius. Keberagaman tersebut berkembang dengan selaras di Kota Semarang sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan-bangunan tersebut antara lain adalah Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Kauman, Masjid Menara (Masjid Layur), Gereja Blenduk (Gereja Immanuel), Kelenteng Gedung Batu (Sam Poo Kong), Pagoda Avalokitesvara, Goa Kreo, Taman Lele, Simpang Lima, *Chinese Town* (Pecinan), Kebun Binatang Wonosari, dan Kota Lama. Selain itu berbagai kesenian dan festival seperti *dhugdheran* yang diselenggarakan setiap Bulan Ramadan dan *Semarang Night Carnival* sebagai rangkaian perayaan HUT Kota Semarang.

Tabel 2.5
Data Jumlah Wisatawan Kota Semarang

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2010	1.915.892 orang
2.	2011	2.100.926 orang
3.	2012	2.712.442 orang
4.	2013	3.157.658 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013

Keberagaman objek wisata di Kota Semarang memberikan pengaruh positif bagi kedatangan jumlah wisatawan ke Kota Semarang. Berdasarkan data pada Tabel 2.5, jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebanyak 611.516 wisatawan dibanding jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata.

Tabel 2.6
Pendapatan Daerah Kota Semarang Sektor Pariwisata

No.	Tahun	Besaran Pendapatan
1.	2010	Rp65.767.643.499,00
2.	2011	Rp78.344.794.420,00
3.	2012	Rp87.978.572.590,00
4.	2013	Rp107.163.316.629,00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013 melalui LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013

Data di atas menunjukkan pendapatan daerah Kota Semarang dari sektor pariwisata. Pendapatan daerah dari sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Semarang.

Sebagai kota yang masih terus mengalami perubahan dan perkembangan, Kota Semarang sendiri tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dalam upaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiadi dan Ma'arif (2009) melakukan penelitiannya mengenai hal tersebut dan didapatkan hasil berupa pemetaan isu permasalahan utama di Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 2.7
Pemetaan Isu Utama di Setiap Urusan Pemerintahan Kota Semarang

No	Ruang Lingkup	Isu Utama
1.	Pendidikan	• Rendahnya kemampuan masyarakat untuk

		<ul style="list-style-type: none"> mengakses pendidikan Rendahnya mutu pendidikan di Kota Semarang
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk Tingginya angka kematian ibu melahirkan Kurangnya cakupan air bersih pada daerah rawan kekeringan Penurunan cakupan imunisasi BCG
3.	Bina Marga & Pengairan	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan rob dan banjir
4.	Cipta Karya/Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas
5.	Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai target sesuai dengan Rencana Tata Ruang Inkonsistensi Rencana Tata Ruang Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
6.	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Inkonsistensi antara program SKPD terhadap RPJM dan RKPD
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pengguna angkutan umum dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi
8.	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya penambangan galian C yang tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum terhadap penambang galian C ilegal Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan maksimal sebagai alat pengendali
9.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi perumahan di Semarang Atas
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran kota Buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
11.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
12.	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pendapatan rumah tangga per bulan
13.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan angka kemiskinan Tingginya angka pengangguran
14.	Tenaga Kerja & Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja Tingginya angka beban ketergantungan
15.	Koperasi & UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya produktivitas SDM dalam UMKM
16.	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Lamanya prosedur perijinan investasi Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan PMA
17.	Kebudayaan &	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya aset bangunan tua bersejarah

	Pariwisata	yang tidak terawat
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional
18.	Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada • Rendahnya partisipasi perempuan dalam pilkada
19.	Pengelolaan Keuangan, Aset, Pengawasan, & Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Semarang • Rendahnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan satu atap atau one stop service (OSS)
20.	Komunikasi & Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan jaringan seluler sebagai media informasi • Rendahnya oplah media cetak
21.	Pertanian & Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya laju konversi lahan pertanian
22.	Kelautan & Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuasi produksi perikanan darat • Penurunan produksi ikan laut • Konsumsi ikan yang masih rendah
23.	Perkebunan & Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan pohon yang tidak terkendali di Semarang Atas

Sumber: Setiadi & Mu'arif, 2009

Pembangunan di Kota Semarang yang lebih banyak difokuskan pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri merupakan pilihan yang logis jika ditimbang dari aspek historis serta karakter geografis. Dari aspek historis, sebagai kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan sejak era kerajaan Hindu-Buddha dan semakin ditegaskan fungsinya di era pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Semarang lebih banyak mengembangkan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi berbasis jasa dengan rancangan tata ruang kota yang juga dibuat berdasarkan tujuan tersebut. Dengan jadi pusat perdagangan dan pemerintahan bagi wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki jumlah lahan yang terbatas di daerah rural untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian guna menunjang kehidupan di wilayah kota. Dalam perkembangannya, fungsi penunjang yang dimiliki oleh wilayah rural tersebut didorong lebih jauh beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Kedungsepur) sebagai *hinterland* dari Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2014, 2), sementara wilayahnya sendiri lebih banyak yang difungsikan sebagai pusat administrasi dan bisnis.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang.

2.3 Pembangunan Ekonomi Kota Semarang Berbasis Lokalitas dalam MICE

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

MICE, atau juga dikenal sebagai *business event*, merupakan salah satu jenis pariwisata yang memadukan antara keperluan bisnis dan wisata untuk kesenangan.

Secara keseluruhan, MICE dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada wisata untuk kesenangan. Pertama, pengeluaran rata-rata per orang untuk aktifitas MICE lebih tinggi daripada pengeluaran wisata untuk kesenangan. Kedua, sebagian besar pengeluaran tersebut lebih banyak terserap untuk biaya komoditas pertemuan seperti sewa tempat dan biaya organisasi, yang berarti bahwa kemungkinan memperoleh keuntungan dari *added value* lebih tinggi daripada jika sebagian besar hanya digunakan untuk transportasi dan makanan. Ketiga, industri wisata berbasis MICE tidak mengenal musim sehingga keuntungan dapat dioptimalkan sepanjang tahun (Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015).

MICE sendiri menjadi pilihan yang rasional bagi Kota Semarang setidaknya karena dua faktor. Pertama, kehidupan ekonomi Kota Semarang lebih banyak didominasi oleh aktifitas bisnis perdagangan. Kota Semarang memiliki delapan kawasan industri aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Banyaknya perusahaan di Semarang tentunya juga berimplikasi pada kuantitas acara bisnis yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kedua, pusat atraksi dari aktifitas MICE adalah acara bisnis yang diselenggarakan, dengan wisata kesenangan sebagai nilai tambah dari paket yang ditawarkan. Dengan fokus yang lebih banyak tertuju pada keikutsertaan di dalam acara bisnis, dapat mengkompensasi minimnya destinasi pariwisata unggulan yang belum dikelola dengan baik. Sementara menjual keunggulan komparatif di sisi pelayanan penyelenggaraan acara bisnis, pemasukan yang diperoleh serta investasi yang masuk dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi objek-objek wisata unggulan Kota Semarang.

Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)” yang bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra kota baik di level nasional maupun internasional guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran. (Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan revitalisasi terhadap objek-objek wisata yang mengangkat budaya lokal, misalnya seperti Kelenteng Sam Poo Kong, Kawasan Gang Baru, Kawasan Kota Lama, Gedung Lawang Sewu, hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Selain revitalisasi, pemerintah juga berupaya menghidupkan kesenian lokal melalui festival yang diadakan, dua di antaranya adalah

festival Masjid Agung Jawa Tengah dan festival Sam Poo Kong (Kementerian Sekretariat Negara, 2007). Dengan menggerakkan kehidupan ekonomi-pariwisata lokal, selanjutnya pemerintah menegaskan misi dibentuknya program SPA dengan diadakannya forum bisnis pengusaha yang bertujuan untuk mempromosikan Kota Semarang (dan sekitarnya) kepada investor melalui acara tahunan yang dinamakan sebagai Semarang Business Forum (Sem'Biz).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem'Biz. Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem'Biz tidak hanya menjadi forum promosi investasi di Kota Semarang saja tetapi juga mengajak kawasan *hinterland* yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Inklusi wilayah Kedungsepur dalam forum Sem'Biz dilatarbelakangi setidaknya oleh dua alasan. Pertama, wilayah *hub* tidak akan berkembang tanpa ada wilayah yang menjadi *spoke*, demikian juga sebaliknya. Pemahaman akan posisi strategis Kota Semarang sebagai pengungkit investasi di region terefleksikan dalam visi Sem'Biz, yaitu menjadikan kota tersebut sebagai *trendmark investment policy* di Jawa Tengah (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Kedua, daya tarik bagi investor untuk bergabung dalam forum ini juga akan lebih tinggi jika yang ditawarkan tidak hanya kesempatan berinvestasi di Kota Semarang saja, melainkan kawasan *Greater Semarang* yang telah terintegrasi dengan baik, minimal dari sisi infrastruktur penunjang industri.

Selanjutnya, forum Sem'Biz yang mempertemukan *stakeholders* bisnis dan investasi mulai dari unsur pemerintah kota/kabupaten, instansi penanaman modal kabupaten/kota, pelaku usaha (investor), asosiasi pengusaha/profesi, lembaga keuangan, BUMN dan BUMD menghasilkan LoI sebagai bukti komitmen para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang dan sekitarnya (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Luaran forum dalam bentuk LoI tersebut yang kemudian menjadi parameter untuk melihat keefektifan Sem'Biz dalam mempromosikan perekonomian *Greater Semarang* yang berbasis potensi lokal.

Dikaitkan dengan potensi lokal sebagai daya tarik investasi dalam Sem'Biz, sebagaimana disampaikan oleh Sita Dewi Pardhihastiwati, koordinator pelaksana

Sem'Biz di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu¹, Kota Semarang secara aktif mempromosikan potensi investasi properti terutama untuk revitalisasi kawasan Kota Lama. Penawaran tersebut dilakukan karena banyak potensi properti yang terbengkalai sementara pemerintah kota tidak memiliki cukup anggaran untuk mengelolanya. Hal ini senada dengan temuan Setiadi dan Ma'arif (2009) mengenai isu utama Kota Semarang yang salah satunya adalah banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat.

Pada hal di sisi lain, revitalisasi bangunan di kawasan Kota Lama merupakan salah satu program yang harus diselesaikan jika pemerintah Kota Semarang memang berkomitmen membangun citra sebagai kota MICE. Kawasan Kota Lama dapat menjadi destinasi wisata pelengkap *business event* yang berlangsung, di mana nilai jualnya yang paling tinggi adalah kemasan romantisme historis yang merupakan salah satu modal sosial-kultural utama yang dimiliki oleh Kota Semarang. Meskipun demikian, Sita menyatakan bahwa nyatanya sulit untuk menarik minat investor untuk memasuki sektor ini karena rumitnya prosedur perizinan yang harus dimiliki sebelum investasi bisa ditanamkan.

Terlepas dari kesulitan yang dialami oleh pemerintah Kota Semarang dalam membangun destinasi wisata historis, Sem'Biz dapat dikatakan berhasil mendatangkan investasi dalam kerangka pembangunan industri MICE. Selain sektor properti historis, Pemerintah Kota Semarang secara agresif membuka peluang investasi properti dalam bentuk hotel, hunian, maupun kawasan perkantoran terpadu. Sebagai contoh, dalam Sem'Biz tahun 2014, investasi yang terkumpul untuk bidang properti tersebut nilainya mencapai Rp 2,93 triliun, lebih dari setengah dari total investasi yang diterima Kota Semarang yaitu sebesar Rp 4,907 triliun (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dari sisi ini, dapat dilihat bahwa Sem'Biz sebagai salah satu forum bisnis investasi tidak lepas dari ide besar arah pengembangan perekonomian Kota Semarang, yaitu sebagai pusat industri, perdagangan, dan MICE yang unggul di level nasional maupun internasional.

Menyadari pentingnya paradiplomasi bagi kemajuan daerah di era globalisasi, Pemerintah Kota Semarang tidak dapat memungkiri urgensi memperkuat modalitas-modalitas lokal sebagai modal utama dalam mempromosikan wilayahnya di arena global. Kesadaran akan peluang akses komunikasi yang dibuka melalui arus

¹ Wawancara dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada hari Rabu, 26 Oktober 2016.

globalisasi dan pemahaman akan potensi lokal Kota Semarang yang berdiri dan berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan mendorong munculnya skema kebijakan publik yang berbasis pada MICE, dengan Sem'Biz sebagai salah satu program pendukungnya.

Meskipun belum sepenuhnya menysasar partner-partner global, Sem'Biz telah memiliki kerangka yang mencukupi untuk dijadikan metode paradiplomasi bagi pemerintah Kota Semarang (dan sekitarnya). Sebagaimana tujuan besar dari paradiplomasi itu sendiri, yaitu membuat *terra incognita* agar masuk dalam radar global, Sem'Biz telah menjadi prototipe bagi metode yang efektif karena mampu menempatkan serta mengokohkan posisi Kota Semarang dan *Greater Semarang* dalam peta bisnis nasional. Nilai investasi yang masuk dari investor-investor nasional dan pergerakan ekonomi yang mengikutinya menjadi bukti nyata atas keefektifan komunikasi yang dilakukan antar *stakeholders*. Dalam forum tersebut juga, masing-masing pemerintah kota/kabupaten telah mampu mengidentifikasi potensi lokal yang layak ditawarkan kepada kalangan investor.

Dalam konteks ini, Sem'Biz sebagai prototipe paradiplomasi Kota Semarang telah menunjukkan bahwa desentralisasi kerjasama (nantinya diharapkan menjadi kerjasama internasional) mampu melengkapi diplomasi pemerintah pusat dalam mempromosikan potensi lokal untuk kegiatan bisnis dan investasi bagi para investor asing. Keterbatasan pemahaman diplomat Republik Indonesia akan informasi potensi lokal yang komprehensif dan terbaru dari masing-masing wilayah telah dijawab dengan munculnya aktor-aktor sub-negara baik dari provinsi, kawasan terikat, hingga kota/kabupaten dalam ranah diplomasi global. Kemunculan aktor-aktor ini tidak saja menawarkan ketersediaan informasi potensi lokal yang memadai, tetapi juga mampu memberikan pemahaman akan permasalahan yang sebenarnya terjadi di daerah, sebagai jawaban akan pendekatan Jakarta-sentris yang seringkali bias dalam memandang permasalahan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang telah memiliki modal dalam membangun paradiplomasi. Dua modal yang paling utama adalah sosial-budaya berupa identitas kultural sebagai kota *melting pot* yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan budaya pendatang. Di satu sisi, modal ini sendiri saja sudah dapat menjadi atraksi untuk pengembangan industri pariwisata berorientasi MICE yang memang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, nilai-nilai historis dan budaya yang terendogensiasi dalam *tangible* maupun *intangible culture*

mampu menjadi romantisme yang mampu menumbuhkan sentimen dari aktor-aktor parner paradiplomasi karena adanya ikatan kultur dalam konteks diaspora maupun keselarasan pemahaman akan nilai-nilai universal yang perlu dipertahankan.

Unsur kedua berupa modalitas ekonomi berkenaan dengan potensi-potensi lokal baik berupa sumber daya alam maupun non-sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai bagian dari *trade-off* negosiasi paradiplomasi yang dilakukan. Di satu sisi, pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya membutuhkan investasi yang nyatanya hanya dapat diperoleh dari luar wilayah mereka. Dengan adanya globalisasi yang membuka peluang terjalannya kontak langsung dengan aktor-aktor negara maupun sub-negara di belahan dunia lain dapat menjadi alternatif sumber investasi, bahkan dengan kekuatan kapital yang lebih besar daripada hanya mengandalkan akumulasi kapital dalam negeri. Di sisi yang lain, partner potensial ini harus mendapat jaminan bahwa potensi lokal yang ditawarkan juga memiliki prospek profitabilitas yang sesuai dengan resiko investasi.

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional mendorong desentralisasi dalam praktek diplomasi. Konsepsi diplomasi dalam konteks tradisional yang dibangun atas paradigma hubungan antar negara dengan legitimasi kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat mulai diperdebatkan lagi dengan munculnya aktor-aktor baru mulai dari perusahaan multinasional (MNCs), organisasi non-pemerintah (NGOs), kelompok epistemik, hingga individu yang dengan adanya globalisasi memiliki kapabilitas politik maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi konstelasi politik maupun hubungan internasional. Perdebatan atas munculnya aktor baru dalam hubungan internasional sendiri telah muncul di era 1970-an melalui "*Transnational Relations and World Politics*" yang ditulis oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang mencoba memprediksi peran perusahaan multinasional dalam konteks hubungan transnasional.²

Dalam perkembangannya, tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi, sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi

² Lihat Keohane R. dan Nye J. *Transnational Relations and World Politics* (Cambridge: Harvard University Press, 1973).

tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Fenomena yang oleh Rodrigo Tavares (2016) disebut sebagai “desentralisasi kerjasama (internasional)” ini memunculkan kemungkinan akan terjadinya diplomasi yang dilakukan juga oleh aktor-aktor di bawah negara, termasuk di antaranya adalah pemerintah daerah. Meskipun terdapat keleluasaan yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 menjadi batasan independensi pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi kerjasama di level global, karena kekuasaan dalam politik luar negeri masih menjadi otoritas absolut pemerintah pusat (Fathun, 2016, 80).

Meskipun demikian, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XII/2006, Permendag No. 3 Tahun 2008, Permendag No. 74 Tahun 2012 dapat menjadi landasan legal dan teknis pemerintah daerah dalam menjalin hubungan transnasional dengan aktor-aktor global lainnya. Berdasarkan wewenang terbatas yang dimiliki, pemerintah daerah dapat membuat dokumen legal yang berfungsi sebagai landasan kerjasama global dalam bentuk *Memorandum of Understanding* atau *Letter of Intent* (LoI) (Fathun, 2016, 81). Diaturnya kemungkinan penggunaan dua instrumen tersebut dalam konteks hubungan transnasional yang dijalin oleh pemerintah sub-nasional dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi dan solusi negara terhadap dinamika yang terjadi, yang mana sering kali tidak dapat direspon secara efektif dan efisien oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan. Dengan kata lain, “*subnational foreign affairs*”, “*subnational foreign policy*”, “*sub-state diplomacy*”, “*multi-layered diplomacy*”, “*constituent diplomacy*”, “*local diplomacy*”, “*local foreign policy*”, “*regional diplomacy*”, “*plurinational diplomacy*”, “*post-diplomacy*”, “*micro diplomacy*”, “*foreign policy localization*”, “*catalytic diplomacy*”, hingga “*paradiplomacy*” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015) yang ditemukan dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada fenomena yang sama. Selanjutnya dalam pembahasan ini,

istilah diplomasi lokal akan digunakan secara bergantian dengan paradiplomasi. Sementara diplomasi lokal lebih menekankan pada aktor yang melakukan diplomasi, paradiplomasi lebih menitikberatkan fokus pada relasi paralelnya³ dengan diplomasi konvensional.

Dengan mengambil fokus kepada relasi, selanjutnya tulisan ini menggunakan definisi yang disampaikan oleh A. Kuznetsov (2015), yang menyatakan bahwa paradiplomasi adalah “*a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors*”. Dalam definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tujuan dari dilakukannya paradiplomasi, yaitu perolehan ekonomi, politik, atau keuntungan yang lainnya. Hal ini berkorelasi dengan *layers of paradiplomacy* yang ditawarkan oleh André Lecours (2008).

Lapisan pertama berkaitan dengan isu ekonomi, di mana pemerintah sub-negara bertujuan untuk membangun eksistensi internasional dalam rangka menarik investasi dan perusahaan asing serta membuka pasar ekspor yang baru. Tidak ada tujuan yang lain dari paradiplomasi lapis pertama ini selain fungsi kompetisi ekonomi global. Lapisan kedua dari paradiplomasi merupakan aktifitas komunikasi yang lebih intens dari lapis pertama, di mana interaksi yang terjalin tidak lagi hanya sebatas fungsi ekonomi tetapi juga telah merambah ke kerjasama untuk peningkatan hubungan *people to people* di level akar rumput dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, dll. Lapisan ketiga dari paradiplomasi memiliki tujuan politik dengan mengadvokasi identitas lokal di level internasional, yang mungkin berbeda dengan persepsi hasil konstruksi pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah sub-negara mencoba membangun hubungan internasional yang dapat mendukung perbedaan budaya, otonomi politik, serta karakter dari komunitas yang diwakilinya (Lecours, 2008, 2-4).

Dari ketiga lapis tersebut, dapat ditarik satu benang merah bahwa apapun yang menjadi dasar dan bagaimanapun pola paradiplomasi, tujuan utamanya adalah menarik perhatian masyarakat global terhadap keunikan region sehingga layak untuk dimasukkan dalam peta global. Dalam konteks ini, paradiplomasi berupaya mengubah

³ Istilah “paradiplomasi” sendiri muncul pertama kalinya pada tahun 1980-an dalam tulisan Ivo Duchaeck dan Panayotis Soldatos yang menggabungkan kata “parallel” dan “diplomacy” (Tavares, 2016, 7).

terra incognita menjadi tempat yang menarik dengan potensi maupun permasalahan yang dimilikinya (Sergunin & Joenniemi, 2014, 1). Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa meningkatnya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-negara yang difasilitasi oleh kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan transportasi juga memunculkan permasalahannya tersendiri.

BAB III

KERJASAMA INTERNASIONAL KOTA SEMARANG MELALUI SISTER CITY

Semakin banyak pemerintah sub-negara yang memotong jalur diplomasi tradisional dapat menimbulkan permasalahan vertikal maupun horizontal. Salah satu permasalahan dengan dimensi horizontal adalah timbulnya *noise* dalam arena diplomasi global, di mana semakin banyak aktor yang masuk dengan segala macam proposal, semakin banyak informasi yang beredar sehingga sulit untuk fokus dalam memilih region mana yang benar-benar prospektif dalam mewujudkan tujuan awal dilakukannya paradiplomasi. Di sisi lain, pemerintah sub-negara perlu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas sehingga perencanaan strategis harus dilakukan jika tidak mau paradiplomasi yang dilakukan hanya berhenti di tahap seremonial. Oleh karena itu, pemerintah sub-negara selain perlu menyiapkan proposal kerja sama yang memahami dan menonjolkan keunikan potensi lokal, juga perlu berpikir strategis dalam mencari *partner*. Bab ini akan menjelaskan secara rinci kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

3.1 Sister City Kota Semarang yang Terlaksana

Sejak tahun 1990-an, Semarang setidaknya-tidaknya sudah menetapkan delapan kerja sama *sister city* dengan berbagai kota yang tidak terbatas hanya di Asia Tenggara, namun juga Asia Timur, Eurasia, hingga ke Eropa bagian timur. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Semarang sudah memiliki hubungan diplomatik antarkota bahkan sebelum Reformasi. Kerja sama *sister city* kota Semarang mencakup: (1) Birsbane, Australia; (2) Beihai, Tiongkok; (3) Griffith University, Australia; (4) Split, Korasia; (5) Fuzhou, Tiongkok; (6) Nanjing, Tiongkok; (7)

Dewan Perairan Daerah Schieland dan Krimpenerwaard, Belanda; serta (8) Ulsan, Korea Selatan. Masing-masing *sister city* memiliki tujuan dan manfaat yang sedikit berbeda dengan yang lain. Namun demikian, lebih penting lagi, mereka berangkat dari satu alasan besar, yaitu kemiripan. Mengasumsikan satu kota memiliki sejumlah kemiripan dengan kota lain merupakan tahap dini untuk memulai proses diplomasi dalam bentuk *sister city*. Kemiripan ini tidak terbatas pada hal-hal materiil seperti tata ruang, tetapi juga yang sifatnya abstrak, misalnya budaya. Subbab-subbab berikut akan mendeskripsikan masing-masing kerja sama *sister city* yang dimiliki oleh kota Semarang.

3.1.1 Brisbane, Australia

Menghadap ke arah Samudera Pasifik, Brisbane merupakan kota yang terletak di pantai negara bagian Australia yang dinamakan Queensland. Kota yang didirikan sejak 1800-an ini merupakan kota ketiga yang penduduknya terpadat se-Australia, dan paling padat populasinya se-Queensland. Lebih penting lagi, Brisbane merupakan ibu kota dari Queensland. Di samping itu, bangunan-bangunan dengan karakteristik khas Queenslander masih tersebar di kota ini. Tidak kalah penting, terdapat Sungai Brisbane yang juga menjadi daya pikat dari kota ini. Fitur-fitur ini, ternyata, tidak eksklusif milik Brisbane. Kota Semarang memiliki sejumlah daya pikat yang menjadi ekuivalen dari fitur-fitur tersebut. Dari masalah populasi, misalnya, Semarang merupakan kota dengan penduduk terpadat kelima se-Indonesia. Seperti halnya Brisbane, Semarang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Meletakkan konteks geografis, Brisbane dan Semarang sama-sama terletak di pantai negaranya. Bangunan-bangunan yang ada di kota Semarang tidak semuanya merupakan karya arsitek modern, terdapat sejumlah bangunan yang mewariskan karakteristik khusus arsitektur Belanda, misalnya di Kota Lama. Kemiripan-kemiripan ini kemudian mendorong kedua kota ini mendirikan kerja sama *sister city*.

Brisbane dan Semarang sudah memiliki hubungan kerja sama *sister city* sejak tahun 1993—membuatnya menjadi *sister city* pertama kota Semarang. Berdasarkan publikasi yang dilansir pada laman resmi *Brisbane City Council* (atau, dalam bahasa Indonesia, Walikota Brisbane), daya pikat kota Semarang yang dipertimbangkan oleh kota Brisbane adalah sebagai berikut (Brisbane City Council 2016). Pertama, Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Kedua, kota ini merupakan pusat pemerintah daerah, industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Ketiga, terletak

di pantai utara dari Jawa Tengah dekat Laut Jawa. Keempat, temperaturnya. Kelima, salah satu pusat perdagangan komersial besar di Jawa. Kelima, populasinya. Keenam, Semarang memiliki pelabuhan yang mengelola pengiriman di Indonesia dengan persentase besar. Ketujuh, industri-industri besar di Semarang, seperti pertanian, perikanan, manufaktur, kayu, kimia, dan lain-lain. Kedelapan, terdapat beberapa perguruan tinggi penting, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Islam Sultan Agung. Serangkaian daya pikat ini mengantarkan kedua kota pada penandatanganan nota kesepahaman untuk membentuk kerja sama *sister city*.

Mengingat nota kesepahaman yang sebelumnya disahkan memiliki masa berakhir, pada tanggal 9 September 2002, kedua kota ini memperbarui kerja sama *sister city*-nya. Instrumen kerja sama pada saat itu dibuat dalam bentuk Persetujuan Persaudaraan Antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Brisbane, yang diberikan keabsahan oleh tanda tangan dari Walikota Brisbane, Jim Soorley, dan Walikota Semarang, Sukawi Sutarip. Hubungan *sister city* ini kemudian mencakup ruang lingkup berikut: (1) ekonomi, perdagangan, dan investasi; (2) pembangunan, pariwisata, seni, dan budaya; (3) pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup; serta (4) pertukaran pegawai dan pertukaran budaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Otonomi Daerah (Otda) di Balai Kota Semarang, paling tidak ada tiga manfaat yang dinikmati kota Semarang sejauh ini. Pertama, meningkatkan wawasan dan mengembangkan kapasitas aparatur sipil negara (atau ASN). Kedua, mempererat hubungan kedua kota. Terakhir, berbagi praktik terbaik (atau, dalam bahasa Inggris, *sharing best practices*). Pada tahun 2017, hubungan persaudaraan antarkota ini diintensifkan lagi melalui pertemuan di *Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum* (APCS) di Daejeon, Korea Selatan.

3.1.2 Beihai, Tiongkok

Serupa dengan kasus yang terjadi pada persaudaraan dengan Brisbane, Semarang memanfaatkan kemiripan-kemiripannya dengan kota Beihai, Tiongkok, untuk mendirikan kerja sama *sister city*. Kemiripan paling menonjol direfleksikan dari nama kota itu sendiri: 'Beihai' berarti 'utara laut'. Demikian pula, seperti yang telah dijelaskan, Semarang merupakan kota pantai di bagian utara provinsi Jawa Tengah. Kemiripan konteks geografis ini tidak terbatas pada letak, namun juga signifikansi. Beihai dianggap sebagai kota pelabuhan di pantai utara Teluk Tonkin, yang melayani

pengiriman-pengiriman perdagangan internasional untuk Guangxi, Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou, dan Yunnan. Sebagai tambahan, kota ini juga memiliki galangan kapal yang besar. Semarang juga melayani pengiriman-pengiriman perdagangan internasional untuk kota-kota di sekitarnya melalui Tanjung Mas. Faktor lain yang menjadi kekuatan pendorong dari berdirinya hubungan *sister city* Beihai-Semarang adalah sosio-kultural. Semarang berbagi sejarah dengan Tiongkok dalam berbagai bentuk. Yang paling populer ialah pariwisata, seperti Klenteng Sam Poo Kong, serta jumlah penduduk keturunan Tionghoa di Semarang. Kemiripan-kemiripan yang menonjol ini memengaruhi wilayah yang dicakup oleh kerja sama *sister city*-nya.

Sebelum menetapkan kerja sama *sister city*, proses paradiplomasinya didahului oleh penandatanganan *Letter of Intention* (LOI atau, dalam bahasa Indonesia, Surat Kehendak) pada tanggal 27 April 2007 di Beihai. Hubungan *sister city* Beihai-Semarang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Walikota Beihai, Lian Younong, dan Wakil Walikota Semarang, Mahfudz Ali, di Beihai, Tiongkok. Instrumen kerja sama *sister city* ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepemahaman Antara Kota Semarang dan Pemerintah Beihai. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otda, terdapat lima wilayah kerja sama yang disepakati, yaitu: (1) pelabuhan dan logistik; (2) pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; (3) seni dan budaya; (4) pariwisata dan lingkungan hidup; dan (5) bidang-bidang lain yang disepakati. Program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pada tahun 2017 ialah pertukaran kunjungan pejabat pemerintah dan pelaku usaha. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang pada waktu itu, Soemarmo, “Beihai tertarik untuk investasi karena Kota Semarang memiliki pangsa pasar yang menjanjikan, tenaga kerja yang relatif murah, dan jaminan kepastian hukum yang lebih mudah” (Kompas.com 2009).

3.1.3 Griffith University, Australia

Jalur paradiplomasi yang ditempuh oleh pemerintah kota Semarang tidak terbatas hanya pada hubungan persaudaraan antarkota. Pemerintah kota Semarang memperpanjang jangkauannya hingga ke tingkat yang lebih rendah lagi dari pemerintah kota, yaitu tingkat perguruan tinggi. Inilah yang terjadi pada kasus hubungan kerja sama pemerintah kota Semarang dengan Griffith University, sebuah universitas publik di negara bagian Queensland, Australia. Berbeda dengan prakondisi yang perlu dipenuhi dalam kasus *sister city*, diplomasi subnasional dengan Griffith

University pada dasarnya sarat dengan prinsip saling menguntungkan tanpa menjadikan kemiripan karakteristik sebagai pertimbangan yang utama dan menentukan. Pada tanggal 24 Oktober 2013, delegasi pejabat pemerintah senior yang dipimpin oleh Sekda Adi Tri Hananto melakukan kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Semarang dan Griffith University di kampus Nathan, bersamaan dengan *Australia Indonesian Business Council* (atau, dalam bahasa Indonesia, Dewan Bisnis Australia Indonesia) dan *Brisbane City Council*. Berdasarkan berita yang dilansir oleh laman resmi Griffith University, kesepakatan yang disahkan pada malam itu mencakup sektor-sektor berikut, yaitu: (1) pendidikan; (2) sains, lingkungan, keahlian teknik, dan teknologi; serta (3) kesehatan dan bisnis (Harris 2013). Tidak kalah penting, untuk mendorong pertukaran pengetahuan, para delegasi pemerintah kota Semarang juga diundang untuk menghadiri lokakarya tentang Pariwisata dan Ketahanan Usaha Kecil; dan Pengelolaan Limbah Lingkungan. Meskipun kerja sama ini diadakan pada tingkat yang berbeda dengan aktor yang berbeda, dapat dikatakan kerja sama dengan Griffith University merupakan upaya pengintensifan dari kerja sama *sister city* Brisbane-Semarang.

3.1.4 Split, Kroasia

Split merupakan sebuah kota yang terletak di bagian Dalmatia, Kroasia. Yang menarik ialah kota ini terletak di bagian timur Laut Adriatik, sebuah perairan yang memisahkan semenanjung Balkan dengan semenanjung Italia. Di samping itu, kota ini dekat dengan pulau Adriatik, yang mana merupakan satu di antara titik pariwisata dengan daya pikat yang signifikan. Menempatkan Semarang ke dalam perbandingan, paling tidak konteks geografis ini memberikan fondasi untuk menunjukkan kemiripan-kemiripan karakteristik yang dimiliki dua kota ini. Serupa dengan kasus Split dan pulau Adriatik, ekuivalennya Semarang ialah Karimun Jawa, yang juga merupakan salah satu tempat untuk pariwisata, khususnya yang berorientasi budaya bahari. Berangkat dari kemiripan-kemiripan ini, Semarang dan Split melakukan paradiplomasi dengan membentuk hubungan persaudaraan.

Pada tanggal 9 September 2014, pemerintah kota Semarang dan pemerintah kota Split melakukan pengesahan landasan hukum untuk mendirikan kerja sama *sister city* antara kedua kota ini. Kerja sama ini kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Split,

yang ditandatangani oleh Walikota Split, Ivo Baldasar, dan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, di Split, Kroasia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otda, terdapat empat area utama yang menjadi fokus dari kerja sama *sister city* Semarang-Split, yang mencakup: (1) pariwisata dan kebudayaan; (2) ekonomi, perdagangan, dan investasi; (3) perencanaan kota, pelatihan teknis, dan administrasi; serta (4) pendidikan dan olahraga. Empat fokus utama ini melampaui kemiripan-kemiripan menonjol yang ada di antara Semarang dan Split.

Terdapat beberapa alasan yang mendorong terjalinnya hubungan *sister city* ini. Pertama, Walikota Hendrar Prihadi mengatakan, “Pemerintah Split memiliki manajemen yang baik dalam mengelola pariwisata. Sebaliknya mereka bisa mengirimkan orang-orang ke Kota Semarang untuk belajar berbagai hal, misal sumber daya alam dan keharmonisan etnis. Kedua kota ini merupakan kota besar di negara masing-masing diharapkan ada simbiosis mutualisme dengan adanya kerjasama ini” (dikutip dalam Permadi 2016). Di samping itu, daya pikat Split juga terletak pada kecakapannya dalam manajemen resiko bencana, khususnya rob dan banjir. Semarang merupakan kota yang secara rutin dilanda rob dan banjir. Fenomena ini umum di, katakanlah, wilayah sekitar kelurahan Terboyo Kulon. Tindak lanjut dari kerja sama *sister city* Semarang-Split pada tahun 2017 terbatas pada pertukaran kunjungan pejabat pemerintah dan pengusaha.

3.1.5 Fuzhou, Provinsi Fujian, RRT

Hubungan kerjasama antara kota Semarang dengan kota-kota Tiongkok telah terjalin cukup harmonis. Hal ini mengingat kedekatan sejarah yang dimiliki antara kota Semarang dengan Tiongkok. Alasan tersebut yang menyebabkan Fuzhou pada akhirnya menghendaki pembentukan *sister-city* dengan kota Semarang. Fuzhou merupakan ibu kota provinsi Fujian, Tiongkok yang berlokasi di pesisir Sungai Min dan berbatasan dengan Selat Taiwan. Fuzhou diproyeksikan menjadi salah satu kota pelabuhan yang akan mendukung program ‘Maritime Silk Road’ yang dicanangkan pada pemerintahan Presiden Xi Jinping. Di sisi lain, kota Semarang juga terpilih menjadi salah satu port pelabuhan dalam proyek tol laut Jokowi. Oleh karena itu, menurut Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang yang menganggap bahwa kerjasama dengan Fuzhou akan menjadi momentum yang bagus bagi kota Semarang untuk dapat melibatkan diri dalam Belt and Road Initiative antara Indoensia dan Tiongkok (Asia Pacific Daily, 2016).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Otda, kerjasama antara kota Semarang dan kota Fuzhou telah diiniasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Kota Kembar. Nota tersebut ditandatangani oleh perwakilan masing-masing kota yakni You Xiao Dong selaku Walikota Fuzhou dan Ir. Slamet Riyadi selaku Kepala Kerjasama Luar Negeri Pemkot Semarang pada tanggal 24 Oktober 2004 di kota Fuzhou, provinsi Fujian, RRT. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2016 telah disepakati perjanjian dalam rangka pembentukan hubungan kota persahabatan antara kedua kota yang ditandatangani oleh Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang dan Yang Yimin selaku Walikota Fuzhou. Adapun ruang lingkup kerjasama antara kedua kota meliputi ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata dan budaya, olahraga, pengembangan SDM, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Namun dari 8 lingkup kerjasama, keduanya akan berfokus terlebih dahulu pada lingkup pariwisata (Setiawan, 2017). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Yang Ying Qiang selaku Jianyang City Party Secretary disela-sela kunjungan ke Semarang beberapa waktu yang lalu.

3.1.6 Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT

Nanjing atau dulu dieja Nanking adalah ibu kota provinsi Jiangsu di Republik Rakyat Tiongkok. Nanjing merupakan kota kedua terpenting di Tiongkok setelah Shanghai dan juga menjadi sebuah kota wisata terkenal dengan banyak tempat bersejarah. Pemerintah kota Nanjing telah berhasil untuk memaksimalkan unsur kuno dan sejarah sehingga menjadikannya salah satu circumvallation kuno terbesar di dunia. Sedikitnya telah terdapat 14 tempat wisata bersejarah di kota tersebut. Alasan inilah yang mengakibatkan kota Semarang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kota Nanjing yang dipandang telah berhasil melakukan pengelolaan pariwisatanya dengan baik. Pemerintah kota Semarang merasa perlu mencontoh model pengelolaan pariwisata dari kota Nanjing mengingat kota Semarang juga memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Oktober 2016 telah disepakati pembentukan sister city antara kota Semarang dengan Nanjing. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ibu Heverina G. Rahayu selaku Wakil Walikota Semarang dan Mr. Miao Ruillin selaku Walikota Nanjing. Kemudian di bulan yang sama, delegasi kota Semarang yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Semarang, Heverina G. Rahayu melakukan kunjungan ke kota Nanjing sekaligus untuk menghadiri undangan Nanjing World Historical and Cultural Cities Expo 2016.

Dalam acara yang dihadiri kepala daerah kota-kota yang memiliki tempat bersejarah tersebut, Wakil Walikota Semarang mengatakan bahwa secara historis kota Semarang tidak bisa dilepaskan dari seni dan budaya Tiongkok atau secara lebih khusus, terdapat hubungan erat antara Semarang dan Nanjing (Jateng Ekspos.com, 2016).

Menurut Otda, terdapat 2 lingkup kerjasama yang berusaha untuk diwujudkan oleh kedua kota selain pada lingkup Pariwisata dan Budaya yakni lingkup Ekonomi dan Perdagangan. Keberadaan sister city dipersepsikan oleh pemerintah kota Semarang sebagai sarana para pengusaha asli Semarang khususnya di sektor industri. Seperti yang apa yang disampaikan oleh Iwan Sutanto, salah satu pemilik PT Java Prima atau dikenal dengan merek Kopi Luak bahwa adanya kerjasama ini dapat membuka lebih luas daerah pemasaran produk-produk kota Semarang dan Tiongkok memiliki market yang besar (Setiawan, 2017). Selanjutnya, para pengusaha ini diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mengimpor produk mereka ke luar negeri termasuk dengan kota Nanjing. Perihal ini berefleksi pada banyaknya industri yang ada di kota Semarang.

3.1.7 Daerah Schieland en Krimpenerwaard, Belanda

Berbeda dengan dua tipe kerjasama sister city yang telah dijalin oleh Pemkot Semarang sebelumnya, kerjasama antara Semarang dengan Daerah Schieland en Krimpenerwaard di Belanda lebih terfokus pada kerjasama antarinstansi yakni Bappeda Kota Semarang. Belanda dan kota Semarang memiliki kemiripan geografis yakni wilayah keduanya berbatasan langsung dengan laut. Bahkan keduanya juga mempunyai masalah yang sama yakni penurunan wilayah pesisir. Dalam upaya mengatasi bahaya tersebut, Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan daerah Schieland en Krimpenerwaard. Kebijakan Schieland en Krimpenerwaard adalah kebijakan yang bertujuan untuk pengendalian banjir dengan pemeliharaan tanggul, kuantitas air dan kualitas air permukaan serta pengolahan limbah air yang diberlakukan pada sepanjang daerah Rotterdam, Zoetermeer hingga Schoonhoven. Maka dari itu, menurut Otda kerjasama ini lebih dipusatkan pada Pengelolaan air terpadu selain juga terdapat lingkup Konservasi warisan budaya khususnya kota lama.

Pada hari Selasa, 22 November 2016 telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkot Semarang yang diwakili Walikota Hendrar Prihadi dan Dewan Perairan Daerah Schieland en Krimpenerwaard yang diwakili Ketua HHSK, Hans Oosters di kota Semarang. Pasca penandatangan kerjasama tersebut, hubungan

antara Semarang dengan Belanda telah mengalami peningkatan signifikan seperti yang terrefleksikan pada beberapa kali kunjungan yang dilakukan perwakilan Pemerintah Belanda ke Semarang. Puncaknya adalah kunjungan yang dilakukan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada 22 November silam. Mark Rutte menegaskan bila Pemerintah Belanda akan ikut terlibat dalam penanganan rob dan banjir di kota Semarang melalui pembangunan Polder Pengendali Banjir Kali Banger. Polder Banger memiliki sistem penanggulangan rob dan banjir yang sama seperti yang sudah diaplikasikan di Belanda (Putra, 2016). Selain itu, Pemerintah Belanda juga berkomitmen untuk membantu penataan kembali Kota Lama agar mampu dimaksimalkan untuk aktivitas pariwisata, kesenian dan budaya sehingga juga dapat mendongkrak perekonomian kota Semarang nantinya. Menurut data yang diperoleh Otda, kedepannya kerjasama antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Kerajaan Belanda akan terus ditingkatkan melalui kunjungan yang akan dilakukan oleh Pemkot Semarang ke Belanda pada tanggal 16-22 April 2017 dan tanggal 30 Oktober-3 November 2017 untuk menghadiri undangan The Amsterdam International Water Week (AIWW).

3.1.8 Ulsan, Korea Selatan

Ulsan atau biasa dikenal Kota Metropolitan Ulsan adalah sebuah kota semiperi yang termasuk ke dalam daerah Kota Junggu, Korsel. Kota ini terletak di bagian tenggara dari Korea Selatan dan langsung berhadapan dengan Laut Jepang. Karena potensi geografis tersebut, Pemerintah Korsel memanfaatkan Kota Ulsan menjadi salah satu fishing port dan center market. Kondisi geografis ini dirasa mirip dengan kondisi Kota Semarang dan melatarbelakangi pembentukan kerjasama sister city antara Ulsan dengan Semarang (Permadi, 2016). Sebelum pembentukan kerjasama sister city ini teralisasi, kedua kota mendahuluinya dengan penandatanganan Letter of Intention (LOI atau, dalam bahasa Indonesia, Surat Pernyataan Kehendak) pada tanggal 13 November 2013 di Semarang. Hubungan kerjasama sister city Semarang-Ulsan disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU atau dalam bahasa Indonesia, Memorandum Saling Pengertian) oleh Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang dan Park Sung Min selaku Walikota Junggu di Kota Junggu, Kota Metropolitan Ulsan pada tanggal 25 November 2016.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otda Semarang, terdapat lima ruang lingkup kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua kota tersebut meliputi (1)

Perencanaan kota dan infrastruktur perkotaan terutama jalan dan jembatan, (2) Pariwisata dan Kebudayaan, (3) Ekonomi, perdagangan, dan investasi, (4) Kesehatan, (5) Pendidikan, IPTEK, dan pelatihan profesional. Pemkot Semarang berencana mengirimkan Dinas Bina Marga Kota Semarang untuk belajar teknologi di Ulsan. Ulsan memiliki teknologi baru dalam bidang infrakstruktur, seperti pengaspalan atau peningkatan kualitas jalan (Wibisono, 2016). Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Selain itu, Pemerintah Kota Ulsan juga berencana untuk menginisiasi kerjasama di sektor perkebunan. Kondisi ini terjadi setelah Wakil Walikota Junggu Ulsan, Choi Sokdoo berkunjung ke Kampoeng Kopi Banaran, Kecamatan Bawean pada tanggal 5 Mei 2017 (Jawa Pos, 2017).

3.2 Analisis Kerja Sama Internasional Kota Semarang

Alexander S. Kuznetsov (2015) menjelaskan ada sedikitnya enam pertanyaan yang dapat diajukan untuk menganalisis paradiplomasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hasil riset Kuznetsov berdasarkan pemikiran-pemikiran ahli paradiplomasi terdahulu di tahun 1980an dan 1990an, seperti Duchacek, Soldatos, Kincaid, Fry, Michelmann, dan lain sebagainya. Enam pertanyaan tersebut antara lain adalah: (1) Apa penyebab meningkatnya aktivitas paradiplomasi di wilayah yang akan dianalisis?; (2) Apa dasar hukum aktivitas diplomasi di negara tersebut?; (3) Apa motivasi utama pemerintah daerah di wilayah tersebut melakukan kerjasama internasional?; (4) Bagaimana pelembagaan paradiplomasi di wilayah tersebut?; (5) Bagaimana sikap atau pandangan pemerintah pusat terhadap paradiplomasi?; serta (6) Apa konsekuensi dari adanya aktivitas paradiplomasi terhadap pembangunan nasional?

Pertanyaan pertama, berkaitan dengan penyebab meningkatnya aktivitas paradiplomasi di suatu kawasan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya paradiplomasi dianalisis (Kuznetsov, 2015, 102). Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari segi eksternal maupun internal. Segi eksternal menyoroti aspek universal, seperti adanya globalisasi, regionalisasi, demokratisasi, ataupun fenomena memudarnya batas-batas *domestic policy* dan *foreign policy* dalam dunia internasional (Kuznetsov, 2015, 102-104). Sementara, dari segi internal, salah satu yang melatarbelakangi misalnya adalah adanya desentralisasi atau meningkatnya peran pemerintah daerah.

Bab II telah menggambarkan bagaimana globalisasi mendorong desentralisasi dalam praktik diplomasi. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam kerja sama internasional. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam membantu pemerintah pusat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Aktor daerah memiliki kapabilitas politik maupun ekonomi yang mempengaruhi konstelasi politik maupun hubungan internasional. Lebih lanjut, Otonomi Daerah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengembangkan kerja sama internasional.

Pertanyaan kedua menyoroti dasar hukum aktivitas paradiplomasi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab, karena bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar hukum menjadi penting untuk melihat kewenangan-kewenangan daerah, misalkan apakah memang pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian (*treaty-making*) dengan aktor asing.

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan aktivitas paradiplomasi. Pertama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengakui bahwa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara yang sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, diperlukan hubungan dan kerja sama internasional, yang antara lain dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut mengatur mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Kedua, Indonesia juga memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan hubungan luar negeri, yang harus didasarkan pada asas kesamaan derajat yang saling menghormati dan saling menguntungkan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri dari masing-masing, yang tersirat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Ketiga, Indonesia memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan tentunya tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini sekaligus menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti. Berdasarkan undang-undang ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menjalin kerja sama internasional, dalam berbagai bidang, seperti bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman atau hibah, promosi potensi daerah, pertukaran budaya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, secara khusus, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyusun Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Daerah merupakan salah satu actor penting dalam hubungan luar negeri. Buku panduan tersebut mengatur secara rinci mekanisme umum konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta koordinasi dan konsultasi hubungan luar negeri dalam bidang-bidang tertentu, yang merupakan kewenangan pemerintah, yang memerlukan koordinasi dengan Daerah. Buku panduan tersebut mengatur secara teknis masalah keprotokolan dan kekonsuleran, pembuatan perjanjian internasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, sehingga aktivitas hubungan luar negeri dapat berjalan lancar.

Ketiga, dalam menganalisis paradiplomasi perlu ditelusuri pula apakah motivasi pemerintah daerah menjalin kerjasama internasional. Motivasi tersebut bisa berupa ekonomi, kultur, ataupun politik (Kuznetsov, 2015, 109). Jika tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari pasar global melalui interaksi dengan aktor asing, maka motivasi kerjasama internasional tersebut adalah ekonomi. Sementara, jika kerjasama internasional menekankan pada persamaan budaya dan bahasa, maka motivasinya adalah motivasi kultural. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek budaya adalah yang pertama kali dipertimbangkan dalam kerjasama internasional tersebut. Terakhir, motivasi politik, yaitu kerjasama internasional yang didorong oleh tujuan politik. Sebagai contoh, pemerintah daerah melakukan paradiplomasi untuk mendapat status otonom yang tinggi, atau bahkan di titik ekstrim, mencari dukungan untuk membentuk negara sendiri (*secessionism*).

Mengacu pada penjelasan di Bab II terkait Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja sama internasional Pemerintah Kota Semarang adalah ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat mendukung terealisirnya prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan kondisi geografis Kota Semarang yang cocok untuk aktivitas perdagangan. Hal ini dapat diperkuat dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010-2015, yakni “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Lebih lanjut, visi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang terpilih adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Dengan demikian, Kota Semarang akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, dan tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Semangat baru tersebut tertuang melalui slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang”.

Kota Semarang merupakan salah satu kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR, bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Kota Semarang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang juga pernah mempertemukan para *stakeholders* bisnis dan investasi, mulai dari unsur pemerintah kota atau kabupaten; instansi penanaman modal kota atau kabupaten; pelaku usaha (investor); asosiasi pengusaha atau profesi; lembaga keuangan; serta BUMN dan BUMD, yang kemudian menghasilkan LoI (*Letter of Intent*) sebagai bukti komitmen para aktor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang dan sekitarnya (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Melalui Sem’Biz, Kota Semarang secara aktif mempromosikan potensi investasi properti, dengan menekankan konsep “*think globally act locally*”, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan Kota Semarang diharapkan untuk berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ciri khas dan nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang, namun dengan orientasi hasil yang berskala global dan internasional. Hal ini tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Pertanyaan keempat yaitu bagaimana pelebagaan paradiplomasi di wilayah tersebut. Beberapa hal yang dapat disoroti antara lain adalah ada tidaknya departemen atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam urusan kerjasama internasional di wilayah tersebut; kunjungan resmi internasional pemerintah daerah; partisipasi dalam berbagai *event* internasional, seperti eksebisi atau konferensi, yang diselenggarakan oleh negara lain; dan membuka kantor di negara lain, seperti *paraconsulate*. Pertanyaan ini selain berfungsi untuk melengkapi data kualitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan data kuantitatif, dengan menyoroti jumlah perjanjian internasional yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah, atau jumlah kunjungan internasional yang sudah dilakukan, jumlah keikutsertaan dalam forum internasional, dan lain sebagainya (Kuznetsov, 2015, 113).

Pemerintah Kota Semarang memiliki Sekretariat Daerah (Setda) Bagian Kerjasama, dan Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2016, Setda Bagian Kerjasama mengadakan Sosialisasi Regulasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri menjadi pembicara (semarangkota.go.id, 2016). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman perkembangan peraturan, mekanisme, prosedur, dan segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dengan luar negeri serta perjalanan dinas dan bukan dinas ke luar negeri di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan kerjasama luar negeri.

Meski Pemerintah Kota Semarang telah memiliki staf khusus yang menangani hubungan luar negeri, berdasarkan wawancara Tim Peneliti dengan Bappeda Kota Semarang, ada sedikitnya tiga hambatan pengimplementasian kerja sama internasional Kota Semarang, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menguasai Bahasa Inggris dengan cukup; komitmen pemimpin kedua kota yang kurang kuat mengenai arah hubungan persaudaraannya; dan perencanaan anggaran yang tidak sukses. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga hubungan luar negeri di lingkungan Pemerintah Kota Semarang belum didukung sumber daya yang baik. Sehingga, hubungan atau kerjasama luar negeri belum berjalan maksimal.

Kelima, penting pula untuk mengamati sikap pemerintah pusat akan paradiplomasi oleh pemerintah daerah ini. Berdasarkan pertanyaan ini, dapat ditemukan dua jawaban, yakni apakah paradiplomasi dipandang sebagai tantangan

atau ancaman oleh pemerintah pusat, atau, paradiplomasi dianggap mampu membawa dampak positif secara nasional. Paradiplomasi akan dianggap sebagai ancaman apabila bertentangan dengan kepentingan nasional, karena egosentrisme dari Daerah, misalnya. Sebaliknya, sikap positif pemerintah terhadap paradiplomasi dapat dilihat dari adanya kerjasama antara Pusat dan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, atau mendukung Daerah menjalankan aktivitas paradiplomasi dan memandang paradiplomasi sebagai *supplementary source* dalam mencapai kepentingan nasional.

Dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan di atas dalam menjawab pertanyaan kedua, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menyadari efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Masing-masing daerah memiliki potensi dan kekhasan daerah, sehingga baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membaca peluang dan tantangan persaingan global. Sebagai contoh, RPJMD Kota Semarang tidak pernah terlepas dari rencana pembangunan nasional dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi, dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Terakhir, adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apakah aktivitas paradiplomasi memberi manfaat atau dampak bagi pembangunan daerah dan nasional. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memperkuat hasil evaluasi paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Jika ditinjau dari segi kuantitas, Pemerintah Kota Semarang berhasil menambah jumlah kerja sama luar negeri Indonesia. Saat ini, ada sedikitnya delapan kerja sama internasional yang berhasil diinisiasi Pemerintah Kota Semarang. Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Namun, tindak lanjut dari kerja sama internasional seringkali terbatas pada pertukaran kunjungan pejabat pemerintah dan pengusaha. Kelemahan di aspek kelembagaan, yang telah dijelaskan dalam menjawab pertanyaan ke-empat, menjadi salah satu alasan utama belum maksimalnya hasil kerja sama internasional Pemerintah Kota Semarang. Sementara, lingkup bidang kerja sama Kota Semarang dengan kedelapan kota tersebut sangat variatif, dan berpotensi dalam mendukung pembangunan nasional.

BAB IV
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anidu dkk, 2014: “Implementasi Kerjasama Sister Schools Sma Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif Diplomasi Publik, dalam [http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah_Imam_Hanafi_and_Ma ngku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf](http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah_Imam_Hanafi_and_Ma_ngku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf).
- A. Epstein. Richard, 2013: “Direct Democracy: GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE?” dalam Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 34. http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34_3_819_Epstein.pdf
- A. Garner, Bryan (ed), 1999: Black’s Law Dictionary seventh Edition, St. Paul Minn, New York.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. n.d. *Banyaknya Angkatan Kerja di Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>.
- _____. *Jumlah Pekerja di Kota Semarang 2012-2014*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8>.
- _____. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 21 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>.
- _____. *Realisasi Volume Ekspor Non Migas Menurut Sektor*. Diakses 22 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/27>.
- Barston, R. P, 2006: "The Changing Nature of Diplomacy" dalam *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education.
- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006: “Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri”.
- Conyers, D, 1984: “Decentralization and Development: a Review of the Literature”, *Public Administration and Development*, Vol. 4.
- Ekins, Richard, 2009: “A Government for the People: The value of representative” dalam [http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP Richard Ekins oct 09.pdf](http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP_Richard_Ekins_oct_09.pdf).
- Fathun, L. M., 2016. Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Hadi, Umar., 2007: “Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional”, Tabloid Diplomasi Edisi Desember 2007. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/55-desember-2007/535->

[diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html](#).

Diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015.

Hermini S., 2013: “Prasyarat Keberhasilan Kerja Sama Sister Province: Studi Kasus Sister Province Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Undip*, Vol. 13, No. 2.

Hidayat, Syarif., 2008: “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation*”, *Jurnal POELITIK* Vol.1 No.1.

Kementerian Sekretariat Negara, 2007. *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 20 November 2016

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667

Kuznetsov, A. S., 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.

Lazuardi, H., 2014. *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016

<http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>

Lecours, A., 2008. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

Pemerintah Kota Semarang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. *Profil Kabupaten/Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2012. *Selayang Pandang Kota Semarang tahun 2012*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2013. *LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

_____. 2014. *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pikiran Rakyat, 2016. *Spirit Akulturasi Tiongok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01

Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri,

http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA_KEMENLU%020152019_FINAL_DONE_SK%20MENLU_pdf_version.pdf.

- Mawhood P. (ed), 1987: “*Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*”, Chicheser: John Wiley & Sons.
- Mukti, Yandu Setiya, 2013: “*Keberhasilan Kerjasama Sister Province Jawa Timur Dengan Gyeongsangnam-Do Korea Selatan Tahun 2006-2012*”, dalam <http://repository.upnyk.ac.id/5735/>
- Niluh Wayan, Budiari, 2013: “*Faktor Pendorong Keberhasilan Kerjasama Sister Province Antara Pemerintah Jawa Timur Dengan Australia Barat (2007-2012)*”, <http://eprints.upnyk.ac.id/3267/>
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983: “*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*”, Washington D.C.: The World Bank.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses pada 21 November 2016 <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>
- Fathun, L. M., 2016. Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Kementerian Sekretariat Negara, 2007. *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 30 November 2016 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667
- Kuznetsov, A. S., 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lazuardi, H., 2014. *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016. <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lecours, A., 2008. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
- Pemerintah Kota Semarang, 2014. *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pemerintah Kota Semarang, n.d. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*, Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pikiran Rakyat, 2016. *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>.
- Roy, S. L., 1993: *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali.

- Ruland, J., 1993: “*Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*”, Boulder: Westview Press.
- Seputar Semarang, n.d. *Kawasan Industri Semarang*. Diakses pada 29 November 2016. <http://seputarsemarang.com/tag/kawasan-industri/>.
- Setiadi, Rukuh, dan Samsul Ma'arif. 2009. "Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Riptek* 25-34.
- Sergunin, A. & Joenniemi, P., 2014. Paradiplomacy as a Sustainable Development Strategy: The Case of Russia's Arctic Subnational Actors. *Eurasia Border Review*, pp. 1-17.
- Sisk.Timothy D., et al., 2001: *Democracy At The Local Level*, International IDEA Handbook Series 4, Publications Office, International IDEA, Strömsborg, SE 103 34, Stockholm, Sweden.
- Smith, B.C., 1985: *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House
- Tavares, R., 2016. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015. *Introduction to MICE Industry*. Diakses pada 30 November 2016. <http://msi.citu.tu.ac.th/uploads/news/file/20150820/en-bhlmp01347.pdf>
- Van der Pluijm, Rogier & Jan Melissen. 2007. *City Diplomacy: The Expanding Role of the Cities in International Politics*. Hague: Netherlands Institute of International Relations.
- Windiani, Reni, 2013:” HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH: *Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.*, dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4934>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Susunan Organisasi

No.	Nama dan Gelar	Bidang Ilmu	Curahan Waktu (jam/minggu)
1.	Dra. Rr. Hermini S., M.Si	Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan	16
2.	Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.	Hubungan Internasional	16
3.	Marten Hanura, S.IP., MPS	Hubungan Internasional	16

Lampiran 2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini akan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di lingkungan universitas. Universitas Diponegoro adalah salah satu universitas besar di Indonesia yang cukup mendukung pelaksanaan penelitian kualitatif seperti ini. Beberapa kekuatan pendukung pelaksanaan penelitian yang ada di Universitas Diponegoro antara lain adalah adanya akses internet yang tanpa batas, sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder. Lebih lanjut, akses internet yang tanpa batas ini juga akan memudahkan peneliti untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berada di luar Semarang.

Akses internet yang tanpa batas ini akan sangat mempengaruhi anggaran penelitian, sehingga dapat dialokasikan untuk keperluan lain penelitian ini. Universitas Diponegoro juga memiliki perpustakaan yang menyediakan berbagai rujukan yang memadai. Ketersediaan rujukan yang memadai oleh lembaga akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada, berdasarkan hasil riset. Keunggulan lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini adalah status Universitas Diponegoro sebagai universitas negeri terbesar di Kota Semarang, bahkan Jawa Tengah. Pemerintah Kota memiliki peran dominan dalam seluruh program pembangunan kota. Meski demikian, akademisi Universitas Diponegoro juga banyak dilibatkan, terutama dalam memberi masukan, usulan, kritikan, maupun saran. Sehingga, meskipun Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro adalah departemen yang baru berdiri pada tahun 2011, tetapi nama besar Universitas Diponegoro dapat membantu memberikan akses ke informan dari Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran 3 Biodata Ketua dan Anggota Tim Penelitian

BIODATA PENELITI

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan Gelar) : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M. Si
2. Jabatan Fungsional : Lektor
3. NIP : 19630422.198903.2.001
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 22 April 1963
5. Alamat Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A RT 01/RW 01 Bulusan
Tembalang Semarang Telp./Faks.
: 024 76482700
6. No. HP : 08156641333
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No. 13 Kampus
Undip Tembalang Semarang
8. Telp./Faks. : 024 7465407 /024 7465405
9. Alamat e-mail : herminis@undip.ac.id atau
herminisq@yahoo.com
10. Mata Kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Politik
2. Teori Politik
3. Lembaga dan Proses Politik Indonesia
4. Kebijakan Publik
5. Azas-Azas Manajemen
6. Pancasila
7. Manajemen Program Pembangunan

II. Riwayat Pendidikan

Program Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu	S1 UNDIP Ilmu Pemerintahan	S2 UGM Ilmu Politik	S3 -
Tahun Masuk Tahun Lulus	1982 1988	1991 1995	- -
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Partisipasi Politik di Kabupaten Temanggung	Proses dan Prospek Integrasi WNI Keturunan Cina di Singkawang	
Nama Pembimbing/Promotor	I. Drs. Hartono II. Drs. A. Hamid Widodo III. Dra. Endang HOK, SU	I. Prof. Yahya Muhaimin II. Prof. Ichlasul Amal III. DR. Budi Winarno	

III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
-----	-------	------------------	-------------------	-------------

1	2015	Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang	Ketua	DIPA FISIP Undip
2	2014	Analisis Keterpilihan Denty Dalam Pemilu DPD RI 2014	Ketua	DIPA FISIP Undip
3	2013	Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri di Provinsi Jateng: Studi Kasus <i>Sister Province</i> Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina	Ketua	BNOPTN
4	2012	Analisis Perbandingan Perran Politik Senat AS dengan DPD Indonesia	Ketua	DIPA FISIP Undip
5	2011	Evaluasi Pencapaian Program MDGs Provinsi Jawa Tengah	Ketua	DIPA FISIP Undip
6	2010	Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010	Anggota	DIPA FISIP Undip
7	2010	Evaluasi dan Pengembangan Model MBS di Wilayah Perdesaan di Jawa Tengah	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengah
8	2010	Implementasi UU NO. 14 Tahun 2008 Menuju Good Governance (Studi Kasus di Kabupaten Sragen dan Banjarnegara)	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengah

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1.	2015	"Pencegahan Praktek Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan Bebas: Origin Fraud dalam Industri Kerajinan Mebel Kayu di Jepara"	Anggota	DIPA FISIP Undip
2.	2015	"Tembakau Sebagai Identitas: Upaya Peningkatan Pengethun Petani Tembakau di Teanggung terhadap Fraud of Origin dalam Menghadapi Perdagangan Bebas"	Anggota	DIPA FISIP Undip
3.	2014	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Didik Dari Kalangan Masyarakat Bawah". Di Kelurahan Meteseh Kota	Anggota	DIPA FISIP Undip

		Semarang		
4.	2014	HI Mengajar : Upaya Peningkatan Taraf Pendidikan Kepemimpinan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
5.	2013	Peningkatan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tentang Peraturan Bekerja di Luar Negeri Serta Budaya Negara-Negara Tujuan	Anggota	DIPA FISIP Undip
6.	2012	Pengabdian Kepada Masyarakat; pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Curug Mandiri Di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal	Anggota	DIPA FISIP Undip
7.	2012	Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Pengembangan Mangrove Education Center dan Mangrove Tourism Center di Kawasan Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang"	Anggota	DIPA FISIP Undip
8.	2011	Pendampingan Pelaksanaan Administrasi Pembukuan Koperasi Serba Usaha Curug Mandiri di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal	Anggota	DIPA FISIP Undip
9.	2011	Fasilitasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip

V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2014	Prasyarat Keberhasilan Kerjasama Sister Province	Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13 No. 2 Agustus 2014 ISSN: 1411 - 8254
2	2014	Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung	Majalah Forum Undip, Vol. 41 No. 1

			Juni 2014, ISSN 0126-0731
3	2013	Pemilukada Miskin Figur	Suara Merdeka
4	2009	Menakar <i>Good Governance</i> di Pemerintahan SBY – Boediono 2009 – 2014	Forum FISIP Universitas Diponegoro
5	2009	Keterpurukan Pemilu DPD, 2009	Suara Merdeka

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 27 November 2017
Ketua Tim Pengusul,

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si

BIODATA PENELITI

I. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan Gelar) : Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int.
Jabatan Fungsional dan Gol : Asisten Ahli/IIIb
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 1 Juli 1987
Nomor HP : 08125227048
Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedharto, SH No.13 Semarang
Telp/Fax : 024-7465405
Email : f.e.wahyudi@undip.ac.id,
f.e.wahyudi@gmail.com
Mata kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
2. Ekonomi Politik Internasional
3. Metode Penelitian HI
4. Globalisasi & Transnasionalisme
5. Organisasi & Administrasi Internasional

II. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Institusi
1	S1	Undergraduate Program of International Relations, Department of International Relations, Universitas Airlangga
2	S2	Globalization & Strategic Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga
3	Diplôme DELF	Centre culturel et de Coopération Linguistique
4	Diplôme DELF	Institute Français d'Indonésie

III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian
1	2009	<i>Islamic Political Movements and Their Political Contestation in Indonesian institutionalized Democracy</i>
2	2009	Problem dan Solusi Perbatasan Indonesia : Kedaulatan, Integritas Bangsa, Pertahanan dan Sumber Daya Alam Strategis
3	2010	Studi Elektabilitas dan Popularitas Bakal Calon Walikota Surabaya
4	2011	<i>On Globalization and Culture: Cultural perception of Indonesian People in The Globalization era</i>
5	2012	<i>Moslem Women Perception on sharia and Khilafah perception in Indonesian Universities</i>

6	2013	Implementasi Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah-Fujian
7	2013	Pemuda, Aktivisme Politik dan Media Baru
8	2014	Pengaruh Globalisasi terhadap Pandangan dan Aktivisme Kebudayaan Kelompok Pemuda di Jawa Tengah
9	2015	ISIS Vis a Vis Islamisme: Respon Gerakan Islam Transnasional terhadap Fenomena Kemunculan ISIS

IV. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

No	Tahun	Judul Artikel	Nama Jurnal, Vol, No, Hlm
1	2010	Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi : Tinjauan Demokrasi Gelombang ke-4 (1991-2000)	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Vol. 23 , Nomor 23 Juli-Sept 2010. ISSN 2086-7050
2	2010	Jalan Curam Hegemoni Amerika Serikat	Jurnal Global dan Strategis. Vol. 3 – No. 1 / 2010-03. Surabaya: Centre for Strategic and Global Studies.
3	2012	Globalisasi dan Desakralisasi Budaya: Tinjauan Dampak Globalisasi Terhadap Budaya	Majalah Pengembangan Ilmu Sosial “Forum”, Vol. 40 – No. 2. Oktober 2012, ISSN 0126-0731
4	2013	<i>Bridging between Transnational Islamism and Indonesian Islamic Tradition: The studies of Hizbut Tahrir Indonesia and Their Approach to The Ulema</i>	7th EuroSEAS Conference 2013 School of Social and Political Sciences – ISCSP University of Lisbon - Lisbon, 02-05 July 2013
5	2015	<i>Reviving the Silk Road between Fujian Province and the Central Java : contribution for future trade relationship</i>	<i>International Conference on “The Relation of Indonesia-China: Dynamics, Problems dan Prospects”</i>
6	2015	<i>Teatrikal Makroekonomisme Globalisasi</i>	Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14, No. 2 Tahun 2015

BIODATA PENELITI

Name : Marten Hanura, S.I.P., M.P.S
 Birthday : Bojonegoro, March 1st 1985
 Sex : Male
 Employment : Lecturer of International Relations Department, Diponegoro University
 Contact Address : Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Central Java 50139
 Contact Number : +62 5755404000/+6281229095606
 Email Address : marten.h@live.undip.ac.id

EDUCATION COLLEGE

Level	Institution	Thesis Title	Year
Master (degree)	Program Specialist “Political Relations and political Process in Russia Modern”, Department of Sociology and Political Science, Tula State University Russia.	Influence of Geopolitical Position In Modern Russian Political Process	2009-2012
Undergraduate (degree)	Department of International Relation Studies, Faculty of Political and Social Science, Gadjah Mada University, Yogyakarta	Emerging Phenomenon Pink Tide in Latin America	2004 - 2009

PROFESSIONAL TRAINING

Institution	Type of Training	Year
English Conversation Program, LBPP LIA Yogyakarta	Elementary	2005
French Language Program, Institut Français Indonesia Yogyakarta	Elementary	2009
Russian Language For Foreigners I, Ministry of Education and Science of The Russian Federation	First level	2010
Russian Language For Foreigners II, Ministry of Education and Science of The Russian Federation	Second level	2012
Institution of Research and Service Societies- Diponegoro University	Article Writing Training National Publication	2013

Institution of Research and Service Societies- Diponegoro University	Training Learning Development by E-Learning for Lecturers	2014
Youth Studies Association of Indonesia; Ministry of Youth and Sports of the Republic Indonesia; Friedrich Naumann Foundation Indonesia	Training Researcher Studies For Youth	2014
Institute for the Development and Education Quality Assurance (LP2MP) –Diponegoro University	Manuscript Writing Training and Publication International Journal	2014

RESEARCH EXPERIENCE

Year	Title Research	Chair/Member Team
2011	Special Report “INDONESIANISTS” in TEMPO MAGAZINE (edition 22th November 2011)	Contributor
2012	Some Forms of Protection Against the Government of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia 2007-2012	Member
2013	Foreign Cooperation Policy Implementation in Central Java Province: A Case Study of Sister Province Between Central Java With Fujian Province-China	Member
2014	Measuring Foreign Policy Relations between Indonesia and Russia in the SBY-JK Rezim	Chair
2015	Telescoped Foreign Policy Relations between Indonesia and Russia in the Joko Widodo Rezim	Chair